



**LAPORAN KINERJA  
INSTANSI PEMERINTAH  
BNN KABUPATEN NGANJUK  
Tahun 2024**

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, sehingga pada akhirnya kami dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Badan Narkotika Nasional Kabupaten Nganjuk sesuai dengan target waktu yang telah ditetapkan.

Akuntabilitas kinerja pada dasarnya merupakan perwujudan kewajiban suatu penyelenggara pemerintahan untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan maupun kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran periodik yang diukur dengan seperangkat indikator (performance indicators). Tujuan utama akuntabilitas kinerja adalah meningkatkan akuntabilitas publik instansi pemerintah dan meningkatkan efisiensi, efektivitas dan produktivitas kinerja organisasi pemerintah serta meminialkan peluang terciptanya korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Azaz akuntabilitas seperti yang tertuang dalam TAP MPR Nomor XI Tahun 1998 dan Undang – Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas KKN menyebutkan bahwa penyelenggara negara harus mempertanggungjawabkan hasil akhir setiap program dan kegiatan kepada masyarakat. Hal ini menyiratkan bahwa wujud akuntabilitas dari penyelenggara pemerintahan adalah mempertanggungjawabkan hasil akhir atau manfaat dari suatu program dan kegiatan yang dapat dirasakan oleh masyarakat. Dengan demikian setiap penyelenggra pemerintahan harus mampu memberikan dan mempertanggungjawabkan manfaat nyata yang bisa dirasakan masyarakat atas setiap pelaksanaan program kegiatan.

Laporan ini merupakan pertanggungjawaban BNN Kabupaten Nganjuk atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang telah diamanatkan oleh BNN RI selama kurun waktu tahun 2024, sejumlah capaian yang ditargetkan dalam rencana kerja tahunan telah berhasil dicapai dan ada sebagian kecil yang belum tercapai yang dituangkan dalam LKIP tahun 2024.

Akhirnya kami berharap semoga Laporan Akuntabilitas Kinerja BNN Kabupaten Nganjuk Tahun 2024 dapat menjadi media pertanggungjawaban dan juga menjadi media evaluasi untuk menilai kinerja BNN Kabupaten Nganjuk secara keseluruhan.

Demikian laporan ini kami sampaikan, untuk menjadi bahan pertimbangan pimpinan, terima kasih.

Nganjuk, 27 Desember 2024

Kepala BNNK Nganjuk



Lilik Dewi Indarwati, AMK, SH, MM

## **EXECUTIVE SUMMARY**

### **(IKHTISAR EKSEKUTIF)**

Amanat Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah menetapkan Badan Narkotika Nasional (BNN) sebagai lembaga pemerintah non kementerian yang berkedudukan di bawah Presiden dan bertanggung jawab kepada Presiden, untuk melaksanakan Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika. BNN Kabupaten Nganjuk sebagai instansi vertikal dari Badan Narkotika Nasional bertanggung jawab untuk menjalankan segala kebijakan teknis terkait P4GN di wilayah Kabupaten Nganjuk.

Selanjutnya, untuk menjalankan tugas pokok dan fungsi BNN Kabupaten Nganjuk ditetapkan 3 (tiga) seksi yaitu : seksi pencegahan dan pemberdayaan masyarakat, seksi pemberantasan, dan seksi rehabilitasi, serta 1 (satu) Sub Bagian Umum.

Dalam rencana strategis BNN Kabupaten Nganjuk Tahun 2020-2024, telah ditetapkan program Pencegahan, Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) di wilayah Kabupaten Nganjuk, dengan indikator yang telah ditentukan.

Rangkuman capaian indikator pencapaian rencana strategis BNN Kabupaten Nganjuk pada tahun 2024 dengan uraian sebagai berikut :

Indeks Ketahanan Diri Remaja Terhadap Penyalahgunaan Narkotika mempunyai target 52,39 dan selama tahun 2024 kegiatan telah dilaksanakan dengan baik dengan realisasi 54,38. Indeks Ketahanan Keluarga Terhadap Penyalahgunaan Narkotika mempunyai target 87,143 BNN Kabupaten Nganjuk mampu merealisasikan sebesar 90,446. Indeks Kemandirian Partisipasi BNN Kabupaten Nganjuk mempunyai target 3,67 dan mampu direalisasikan sebesar 3,71. Persentase penyalahguna dan/atau pecandu narkotika yang mengalami peningkatan kualitas hidup mempunyai target 68% dengan realisasi 92,97%. Indikator kinerja Jumlah petugas penyelenggara layanan IBM yang terlatih mampu mencapai target 100% yaitu 10 orang. Indikator kinerja Jumlah lembaga rehabilitasi yang operasional kegiatan telah dilaksanakan dengan baik sesuai dengan target indikator kinerja tersebut. Indeks Kepuasan Penerima Layanan Rehabilitasi Pada Fasilitas Rehabilitasi BNN dengan target 3,60 mampu direalisasikan sebesar 3,56. Untuk nilai IKPA BNN Kabupaten Nganjuk TA 2024 mampu terealisasi nilai maksimal yaitu 100%.

Adapun langkah-langkah antisipatif untuk memaksimalkan pencapaian target adalah:

1. Meningkatkan koordinasi dan kerjasama internal pegawai BNN Kabupaten Nganjuk;
2. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait lainnya dengan maksud untuk menyamakan persepsi terkait pelaksanaan UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Pagu anggaran BNN Kabupaten Nganjuk Tahun 2024 untuk mendukung pelaksanaan program Pencegahan, Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba adalah sebesar Rp. 1.770.810.000,- bisa direalisasikan untuk melaksanakan kegiatan sebanyak Rp. 1.770.229.644,- sehingga capaian kerjanya yaitu 100%.

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>i</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>ii</b>
<b>IKHTISAR EKSEKUTIF .....</b>	<b>iv</b>
<b>BAB I           PENDAHULUAN</b>	
A     Gambaran Umum.....	1
B     Dasar Hukum .....	2
C     Tugas Pokok Dan Fungsi Organisasi Serta Struktur Organisasi.....	3
<b>BAB II           PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA</b>	
A.    Rencana Program Kerja .....	5
B.    Rencana Kinerja Tahunan .....	11
C.    Perjanjian Kinerja .....	13
<b>BAB III          AKUNTABILITAS KINERJA BNNK NGANJUK</b>	
A.    Analisis Capaian Sasaran .....	15
B.    Akuntabilitas Keuangan .....	45
<b>BAB IV          PENUTUP .....</b>	<b>47</b>
<b>LAMPIRAN</b>	

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Gambaran Umum

Gambaran kondisi umum, potensi, dan permasalahan pembangunan P4GN dipaparkan berdasarkan dari hasil pencapaian program periode sebelumnya, kondisi lingkungan strategis, dan perkembangan baru lainnya. Potensi dan permasalahan pembangunan P4GN akan menjadi input dalam menentukan arah kebijakan dan strategi BNN Kabupaten Nganjuk pada periode 2020-2024. Pada perkembangannya, kejahatan narkoba yang bermutasi dengan kejahatan lainnya menyebabkan kerugian sosial ekonomi secara material diperkirakan mencapai sebesar 84,6 Triliun Rupiah per tahunnya.

Perkembangan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba yang melanda dunia berimbas juga ke tanah air, perkembangannya begitu pesat sehingga sangat mengkhawatirkan. Narkoba juga sudah menyebar sampai ke pelosok pedesaan dan telah mengorbankan ribuan bahkan jutaan jiwa anak bangsa akibat terjerat narkoba. Berdasarkan data yang ada di BNN, tidak satu Kabupaten/Kota di Indonesia yang terbebas dari masalah narkoba.

Berdasarkan data yang bersumber dari Laporan Survei Prevalensi Penyalahgunaan Narkoba di Indonesia Tahun 2023, angka prevalensi setahun terakhir penyalahgunaan narkoba menurun dari 1,95% pada tahun 2021 menjadi 1,73% di tahun 2023. Secara umum terjadi penurunan angka prevalensi di wilayah pedesaan maupun di perkotaan.

Dengan kondisi tersebut diatas, BNN melakukan berbagai upaya dalam rangka Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) di Indonesia. Salah satu upaya yang dilakukan adalah penguatan kelembagaan BNN sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Di tingkat propinsi, Badan Narkotika Nasional telah meningkatkan peran BNNP dan BNN Kabupaten/Kota, BNN Kabupaten Nganjuk sebagai instansi vertikal BNN bertanggung jawab untuk melaksanakan segala kebijakan teknis terkait Pencegahan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba di wilayah Kabupaten Nganjuk.

BNN Kabupaten Nganjuk didukung oleh personel yang terdiri dari PNS Organik BNN , Polri dan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri. Total dari anggota BNN Kabupaten Nganjuk sejumlah 32 orang. Berikut rincian dari Anggota tersebut :

No	Uraian	Jumlah	DSP	Kurang	% DSP terisi
1	PNS Organik BNN	10	74	42	43,24%
2	POLRI	6			
3	TKK/PPNPN	16			
<b>TOTAL</b>		<b>32</b>			

Bila dilihat pada data tersebut, bahwa SDM yang tersedia pada tahun anggaran 2024 ini masih jauh dari DSP yang seharusnya. Satker pada BNN Kabupaten Nganjuk secara keseluruhan merasakan ini sebagai kendala dalam melakukan kegiatan P4GN di Kabupaten Nganjuk. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, satker melakukan efisiensi atas penggunaan SDM dalam pencapaian kinerja dengan cara memberdayakan pegawai lintas seksi bila ada kegiatan yang memang diperlukan.

Selain Sumber Daya Manusia, untuk menjalankan fungsi organisasi dibutuhkan juga Sumber Daya Anggaran. Tahun anggaran 2024 BNNK Nganjuk didukung anggaran sebesar **Rp. 1.770.810.000,-**.

## B. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 214 Tahun 2017 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga;
4. Permenpan dan RB Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

5. Keputusan Kepala BNN Nomor KEP/388/XII/2015/BNN Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyusunan Laporan Kinerja di Lingkungan BNN, BNNP, dan BNNK/Kota.

## **C. Tugas Pokok Dan Fungsi Organisasi Serta Struktur Organisasi**

### **1. Tugas Pokok**

- a. Melaksanakan kebijakan nasional mengenai pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba;
- b. Berkoordinasi dengan Kepala Kepolisian Resort Nganjuk dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba;
- c. Memberdayakan masyarakat dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba;
- d. Memantau, mengarahkan, dan meningkatkan kegiatan masyarakat dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba;
- e. Melakukan kerjasama dengan instansi pemerintah di tingkat daerah dalam upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba;
- f. Membuat laporan tahunan mengenai pelaksanaan tugas dan wewenang.

### **2. Fungsi Organisasi**

Dalam melaksanakan tugasnya BNNK Nganjuk menyelenggarakan fungsi :

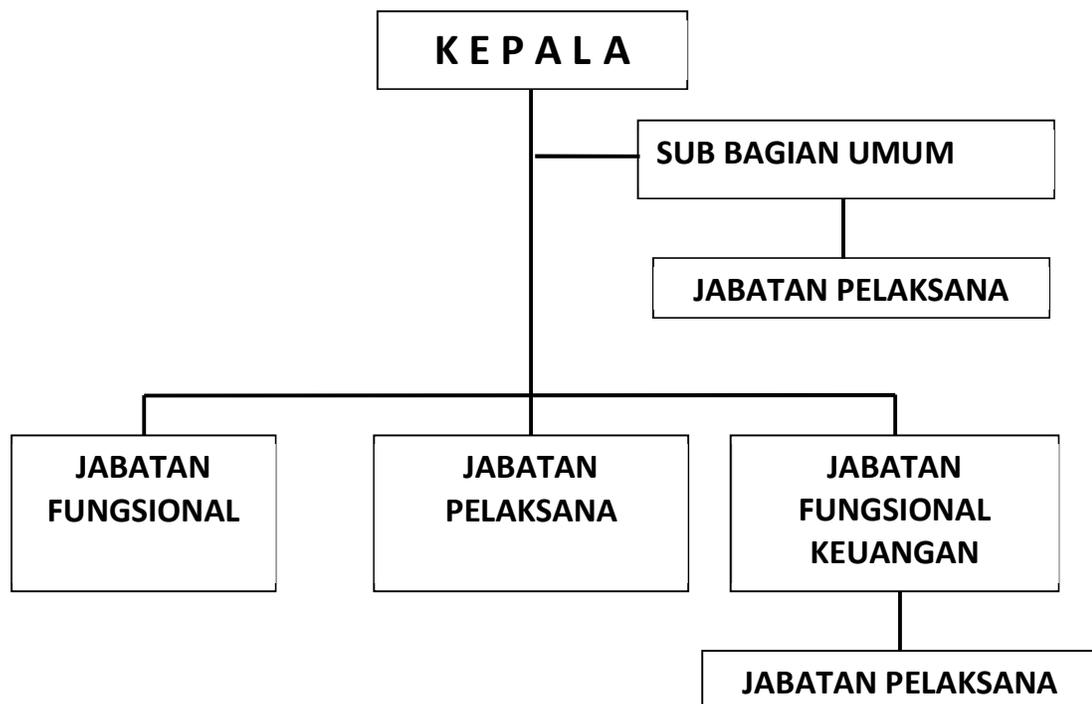
- a. Pelaksanaan kebijakan teknis P4GN di bidang pencegahan, Pemberdayaan masyarakat dan rehabilitasi;
- b. Pelaksanaan kebijakan teknis P4GN di bidang pemberantasan dalam rangka pemetaan jaringan kejahatan terorganisasi penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, psikotropika, prekursor, dan bahan adiktif lainnya kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol dalam wilayah kabupaten Nganjuk;
- c. Pelaksanaan penyiapan bantuan hukum dan kerja sama;
- d. Penyusunan rencana program dan anggaran BNNK Nganjuk;
- e. Evaluasi dan penyusunan laporan BNNK Nganjuk; dan
- f. Pelayanan administrasi BNNK Nganjuk.

### 3. Struktur Organisasi

Struktur Organisasi sebagaimana di atur dalam peraturan Kepala BNN Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja (OTK) Badan Narkotika Nasional Propinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/ Kota adalah sebagai berikut :

1. Kepala.
2. Subbagian Umum.
3. Jabatan Fungsional.
4. Jabatan Pelaksana.

#### STRUKTUR ORGANISASI BADAN NARKOTIKA NASIONAL KABUPATEN NGANJUK



## BAB II

### PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

#### A. Rencana Program Kerja

Rencana Strategis (Renstra) BNN Tahun 2020–2024 ditetapkan melalui Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Narkotika Nasional Tahun 2020–2024. Renstra BNN 2020–2024 dirancang dengan merujuk pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020–2024 dan menjadi pedoman bagi penyusunan program kerja tahunan lembaga, yaitu Rencana Kerja (Renja) BNN dan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) BNN. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) mengamanatkan bahwa setiap kementerian/lembaga perlu menyusun Rencana Strategis (Renstra) yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Penyusunan Renstra dilaksanakan melalui pendekatan proses teknokratik, politik, partisipatif, top down, dan bottom up, dengan pendekatan substansial yang holistik, integratif, tematik, dan spasial (HITS). Dokumen Renstra menjadi dasar bagi gerak strategis dan operasional BNN sebagai LPNK dalam menangani isu nasional dan sekaligus mewujudkan tujuan dan sasaran pembangunan nasional dalam penanganan dan penanggulangan permasalahan narkoba.

Dalam penyusunan visi dan misi Tahun 2020-2024, BNN berpedoman atau mengacu pada visi dan misi presiden terpilih periode 2020-2024, yaitu “Terwujudnya Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian, berlandaskan gotong royong”.

Kepala BNN telah menetapkan visi BNN, yaitu:

“Mewujudkan masyarakat yang terlindungi dan terselamatkan dari kejahatan narkoba dalam rangka menuju Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong”

Dalam rangka pencapaian visi, BNN juga memperbaharui misinya agar mencerminkan kegiatan inti dan mandatnya dengan lebih baik. Misi BNN yaitu:

1. Memberantas Peredaran Gelap dan Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika secara Profesional;
2. Meningkatkan Kemampuan Lembaga Rehabilitasi dan Pemberdayaan Ketahanan Masyarakat terhadap Kejahatan Narkotika;
3. Mengembangkan dan Memperkuat Kapasitas Kelembagaan.

Visi dan misi BNN tersebut dijabarkan ke dalam tujuan yang ingin dicapai pada tahun 2024, yaitu:

1. Melindungi dan menyelamatkan masyarakat dari penyalahgunaan dan peredaran narkoba, dengan tolok ukur dan target capaian Angka Prevalensi Penyalahgunaan Narkotika sebesar 1,69; serta
2. Mewujudkan transformasi layanan publik yang berkualitas, dengan tolok ukur dan target capaian Indeks Pelayanan Publik berkategori "Sangat Baik"

Untuk mendukung pencapaian tujuan yang terukur dan dapat dicapai, BNN menetapkan sasaran strategis yang merupakan kondisi riil yang diinginkan/dicapai pada akhir periode perencanaan, yaitu:

1. Meningkatnya penanganan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, dengan indikator Indeks P4GN; dan
2. Terwujudnya manajemen organisasi yang profesional produktif, dan proporsional serta berkinerja tinggi, dengan indikator Indeks Reformasi Birokrasi.

**Matrik Rencana Kinerja  
Badan Narkotika Nasional Kabupaten Nganjuk  
Tahun 2020-2024**

NO	KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET KINERJA				
				2020	2021	2022	2023	2024
1.	Pengelolaan Informasi dan Edukasi	Meningkatnya daya tangkal anak dan remaja terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika	Angka Indeks Ketahanan Diri Remaja Terhadap Penyalahgunaan Narkoba	50,03	51	52	53	53,51
2.	Penyelenggaraan Advokasi	Meningkatnya daya tangkal keluarga terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika	Angka Indeks Ketahanan Keluarga Terhadap Penyalahgunaan Narkoba	75	78	78	78	78
3.	Pemberdayaan Peran Serta Masyarakat	Meningkatnya kesadaran dan kepedulian masyarakat dalam penanganan P4GN	Angka Indeks Kemandirian Partisipasi	3	3,22	3,22	3,22	3,22
4.	Penyelenggaraan Pemberdayaan Alternatif	Meningkatnya upaya pemulihan kawasan atau wilayah rawan narkoba secara berkelanjutan	Nilai Keterpulihan Kawasan Rawan yang diintervensi	0	0	0	0	0
5.	Penguatan Lembaga Rehabilitasi Komponen Masyarakat	Meningkatnya aksesibilitas dan kemampuan fasilitas layanan rehabilitasi narkotika	Jumlah lembaga rehabilitasi yang operasional	1	1	1	1	1
			Jumlah unit penyelenggara layanan rehabilitasi IBM	1	1	1	1	1
			Indeks kepuasan layanan klinik rehabilitasi BNNK	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2

NO	KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET KINERJA				
				2020	2021	2022	2023	2024
6.	Penyidikan Jaringan Gelap Peredaran Gelap Narkotika	Meningkatnya pengungkapan tindak pidana narkotika dan lahantanaman ganja dan tanaman terlarang lainnya	Jumlah berkas perkara tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika yang P-21	1	1	1	1	1
9.	Pengawasan Tahanan dan BarangBukti	Meningkatnya pengawasan tahanan dan barang bukti narkotika						
7.	Penyusunan dan Pengembangan Rencana Program dan Anggaran BNN	Meningkatnya proses manajemen kinerja secara efektif dan efisien	Nilai Kinerja Anggaran BNNK	88	90	90	90	90
8.	Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan	Meningkatnya tata kelola administrasi keuangan yang sesuai prosedur	Nilai IKPA BNNK	88	94	94	94	94

**Matrik Rencana Kebutuhan Pendanaan  
Badan Narkotika Nasional Kabupaten Nganjuk  
Tahun 2020-2024**

NO	KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET KINERJA				
				2020	2021	2022	2023	2024
1.	Pengelolaan Informasi dan Edukasi	Meningkatnya daya tangkal anak dan remaja terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika	Angka Indeks Ketahanan Diri Remaja Terhadap Penyalahgunaan Narkotika	180.000.000	180.000.000	190.000.000	200.000.000	200.000.000
2.	Penyelenggaraan Advokasi	Meningkatnya daya tangkal keluarga terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika	Angka Indeks Ketahanan Keluarga Terhadap Penyalahgunaan Narkotika	65.000.000	80.000.000	120.000.000	120.000.000	120.000.000
3.	Pemberdayaan Peran Serta Masyarakat	Meningkatnya kesadaran dan kepedulian masyarakat dalam penanganan P4GN	Angka Indeks Kemandirian Partisipasi	248.630.000	248.630.000	248.630.000	248.630.000	248.630.000
4.	Penyelenggaraan Pemberdayaan Alternatif	Meningkatnya upaya pemulihan kawasan atau wilayah rawan narkotika secara berkelanjutan	Nilai Keterpulihan Kawasan Rawan yang diintervensi	0	0	0	0	0
5.	Penguatan Lembaga Rehabilitasi Komponen Masyarakat	Meningkatnya aksesibilitas dan kemampuan fasilitas layanan rehabilitasi narkotika	Jumlah lembaga rehabilitasi yang operasional	3.200.000	48.712.000	93.575.000	100.000.000	115.000.000
			Jumlah unit penyelenggara layanan rehabilitasi IBM					
			Indeks kepuasan layanan klinik rehabilitasi BNNK					

NO	KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET KINERJA				
				2020	2021	2022	2023	2024
6.	Penyidikan Jaringan Gelap Peredaran Gelap Narkotika	Meningkatnya pengungkapan tindak pidana narkotika dan lahan tanaman ganja dan tanaman terlarang lainnya	Jumlah berkas perkara tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika yang P-21	62.500.000	62.500.000	65.000.000	65.000.000	65.000.000
9.	Pengawasan Tahanan dan Barang Bukti	Meningkatnya pengawasan tahanan dan barang bukti narkotika						
7.	Penyusunan dan Pengembangan Rencana Program dan Anggaran BNN	Meningkatnya proses manajemen kinerja secara efektif dan efisien	Nilai Kinerja Anggaran BNNK	26.408.000	26.408.000	27.500.000	27.500.000	27.500.000
8.	Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan	Meningkatnya tata kelola administrasi keuangan yang sesuai prosedur	Nilai IKPA BNNK	130.378.000	130.378.000	130.378.000	130.378.000	130.378.000

## B. Rencana Kinerja Tahunan

### RKT BNNK Nganjuk TA 2024

NO	KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET KINERJA	KEBUTUHAN PENDANAAN
1.	Pengelolaan Informasi dan Edukasi	Meningkatnya daya tangkal anak dan remaja terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika	Indeks Ketahanan Diri Remaja Terhadap Penyalahgunaan Narkotika	52.39 Indeks	80.000.000
2.	Penyelenggaraan Advokasi	Meningkatnya daya tangkal Keluarga terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika	Indeks Ketahanan Keluarga Terhadap Penyalahgunaan Narkotika	87,143 Indeks	40.000.000
3.	Pemberdayaan Peran Serta Masyarakat	Meningkatnya kesadaran dan kepedulian masyarakat dalam penanganan P4GN	Indeks Kemandirian Partisipasi	3.67 Indeks	143.785.000
4.	Penguatan Lembaga Rehabilitasi Instansi Pemerintah	Meningkatnya upaya pemulihan penyalahgunaan dan atau pecandu narkotika	presentase penyalahgunaan dan atau pecandu narkotika yang mengalami peningkatan kualitas hidup	68 %	
5.	Penguatan Lembaga Rehabilitasi Instansi Pemerintah	Meningkatnya kapasitas tenaga teknis rehabilitasi	Jumlah petugas penyelenggara layanan yang terlatih	10 orang	14.890.000
6.	Penguatan Lembaga Rehabilitasi Komponen Masyarakat	Meningkatnya aksesibilitas dan kemampuan fasilitas layanan rehabilitasi narkotika	Jumlah lembaga rehabilitasi yang operasional	1 lembaga	4.060.000
7.	Penguatan Lembaga Rehabilitasi Komponen Masyarakat	Meningkatnya aksesibilitas dan kemampuan fasilitas layanan rehabilitasi narkotika	Jumlah unit penyelenggara layanan rehabilitasi IBM yang operasional	2 unit	29.330.000
8.	Penguatan Lembaga Rehabilitasi Komponen Masyarakat	Meningkatnya kualitas layanan rehabilitasi narkotika di Klinik Rehabilitasi	Indeks kepuasan layanan klinik rehabilitasi BNNK	3.60 Indeks	

9.	Penyusunan dan Pengembangan Rencana Program dan Anggaran BNN	Meningkatnya proses manajemen kinerja secara efektif dan efisien	Nilai Kinerja Anggaran	89 Indeks	6.562.000
10.	Penyusunan dan Pengembangan Rencana Program dan Anggaran BNN	Meningkatnya tata kelola administrasi keuangan yang sesuai prosedur	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)	100 Indeks	53.760.000
11				3237	11.440.000
12				3239	1.207.046.000
13				3979	6.204.000
14				3258	39.250.000

### **C. Perjanjian Kinerja**

Perjanjian Kinerja merupakan tekad dan janji kinerja tahunan yang akan dicapai, antara pimpinan instansi pemerintah/unit kerja yang menerima amanah/tanggung jawab dengan pihak yang memberikan amanah/ tanggung jawab. Penetapan kinerja merupakan suatu janji yang akan diwujudkan oleh seorang pejabat penerima amanah, sekaligus sebagai pimpinan organisasi atau instansi kepada atasan langsungnya. Penetapan kinerja berisikan sasaran strategis, indikator kinerja dan target yang akan dicapai melalui program yang ada pada lembaga/instansi yang bersangkutan.

Penetapan kinerja yang telah direncanakan dan ditandatangani oleh Kepala BNNK Nganjuk dan Kepala BNNP Jawa Timur pada awal tahun 2024. Adapun penetapan kinerja/ perjanjian kerja BNNK Nganjuk tahun 2024 sebagaimana tabel di bawah ini :

## PERJANJIAN KINERJA

### BADAN NARKOTIKA NASIONAL KABUPATEN NGANJUK Tahun 2024

No	Sasaran	Nama Indikator	Target
1	Meningkatnya daya tangkal anak dan remaja terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika	Indeks Ketahanan Diri Remaja Terhadap Penyalahgunaan Narkoba	52.39 Indeks
2	Meningkatnya daya tangkal Keluarga terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika	Indeks Ketahanan Keluarga Terhadap Penyalahgunaan Narkoba	87,143 Indeks
3	Meningkatnya kesadaran dan kepedulian masyarakat dalam penanganan P4GN	Indeks Kemandirian Partisipasi	3.67 Indeks
4	Meningkatnya upaya pemulihan penyalahguna dan atau pecandu narkotika	presentase penyalah guna dan atau pecandu narkotika yang mengalami peningkatan kualitas hidup	68 %
5	Meningkatnya kapasitas tenaga teknis rehabilitasi	Jumlah petugas penyelenggara layanan yang terlatih	10 orang
6	Meningkatnya aksesibilitas dan kemampuan fasilitas layanan rehabilitasi narkotika	Jumlah lembaga rehabilitasi yang operasional	1 lembaga
7	Meningkatnya aksesibilitas dan kemampuan fasilitas layanan rehabilitasi narkotika	Jumlah unit penyelenggara layanan rehabilitasi IBM yang operasional	2 unit
8	Meningkatnya kualitas layanan rehabilitasi narkotika di Klinik Rehabilitasi	Indeks kepuasan layanan klinik rehabilitasi BNNK	3.60 Indeks
8	Meningkatnya proses manajemen kinerja secara efektif dan efisien	Nilai Kinerja Anggaran	89 Indeks
10	Meningkatnya tata kelola administrasi keuangan yang sesuai prosedur	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)	100 Indeks

**BAB III**  
**AKUNTABILITAS KINERJA**  
**BADAN NARKOTIKA NASIONAL KABUPATEN NGANJUK**

**A. Analisis Capaian Sasaran**

Penetapan Kinerja BNNK Nganjuk tahun 2024 menetapkan indikator kinerja sebanyak 10 indikator dengan target yang telah ditetapkan BNN RI. Untuk mencapai target indikator tersebut, BNNK Nganjuk melakukan kegiatan sesuai dengan DIPA 2024 serta kegiatan non DIPA dalam rangka meningkatkan akuntabilitas kinerja BNNK Nganjuk.

Berikut ini dijelaskan realisasi pencapaian 10 (sepuluh) Indikator Kinerja, yang diuraikan sebagai berikut:

**1.**

**Sasaran: Meningkatnya daya tangkal anak dan remaja terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba**

**A. Defenisi Operasional**

Defenisi operasional dari indeks ketahanan diri remaja adalah tingkat daya tangkal anak dan remaja terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba.

**B. Metode Pengukuran**

Metode pengukuran indeks ketahanan diri remaja adalah pada hasil olah data kuesioner survey/ wawancara melalui aplikasi : <https://dektari.bnn.go.id> atau melalui aplikasi mobile “Dektari Aja” kepada responden yang sudah mendapatkan pengelolaan Informasi dan Edukasi dari BNN atau pelajar/mahasiswa yang telah dilakukan kegiatan penyuluhan/ sosialisasi di Tingkat BNNK masing-masing pada tahun 2024.

### C. Analisis dan evaluasi realisasi kinerja

Sesuai estimasi tentang hasil perhitungan Indeks Ketahanan Diri remaja terhadap penyalahguna narkoba (dektari) Direktorat Informasi dan Edukasi tahun 2024 di Badan Narkotika Nasional Kabupaten Nganjuk dengan menggunakan aplikasi Web didapatkan hasil sebesar 54,38 (lima puluh empat koma tiga puluh delapan) dari target 52,39 (lima puluh dua koma tiga puluh sembilan) atau dengan persentase 103,7 % (seratus tiga koma tujuh persen) dengan kategory “sangat tinggi”

No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	Indeks Ketahanan Diri Remaja Terhadap Penyalahgunaan Narkoba	52,39	54,38	103 %

Target kinerja Indeks Ketahanan Diri Remaja Terhadap Penyalahgunaan Narkoba telah sesuai dengan yang tertuang dalam Rencana Program Kerja jangka menengah BNNK Nganjuk, , sebagaimana tergambar dalam tabel berikut:

No.	Indikator Kinerja	Target RENPROJA BNNK Nganjuk	Target RKT TA 2024	Target TA 2024
1	Indeks Ketahanan Diri Remaja Terhadap Penyalahgunaan Narkoba	52,39	52,39	52,39

Jika dibandingkan dengan pencapaian tahun sebelumnya secara realisasi terdapat kesamaan. Adapun perbandingan data tersebut dapat dilihat di tabel dibawah ini :

NO	Tahun	Target	Realisasi	Persentase
1	2020	-	-	-
2	2021	51 indeks	50,23 indeks	98,4 %
3	2022	52 Indeks	56,89 Indeks	109 %
4	2023	53 Indeks	52,39 Indeks	98,85 %

5	2024	52,39 Indeks	54,38 Indeks	103 %
---	------	--------------	--------------	-------

#### **D. Faktor Keberhasilan dan kegagalan**

Adapun faktor yang menyebabkan kegagalan pelaksanaan kegiatan ini yakni kurangnya sarana dan prasarana pada responden. Hal ini dikarenakan pelaksanaan pengisian kuesioner dilaksanakan setelah kegiatan penyuluhan yang dilaksanakan di sekolah, sehingga responden yang terdiri dari para siswa sekolah tidak diperbolehkan membawa perangkat Handphone untuk mengisi link kuesioner.

Faktor yang menunjang keberhasilan telaksananya kegiatan yakni adanya sumber daya yang berkompeten untuk mengerjakan setiap kegiatan masing-masing, serta adanya koordinasi yang kuat antar bidang dan juga adanya arahan dari pimpinan dalam melaksanakan setiap kegiatan.

#### **E. Efisiensi Kinerja Anggaran dan SDM**

BNNK Nganjuk dalam melaksanakan kegiatan ini didukung anggaran sebesar Rp. 80.000.000,- dan mampu terserap sebesar Rp. 80.000.000,- atau 100%. Penyerapan anggaran yang optimal tersebut sebagai komitmen BNNK Nganjuk terhadap RPD yang telah disusun. Dukungan SDM BNNK Nganjuk saat ini sebanyak 32 anggota yang merupakan 43% dari jumlah ideal personel di BNNK. Namun begitu BNNK Nganjuk mampu mengoptimalkan personel yang ada dalam melaksanakan kegiatan. Dari anggaran dan SDM yang tersedia, BNNK Nganjuk pada dasarnya mampu melaksanakan kegiatan dengan baik.

#### **F. Rekomendasi Perbaikan**

Sebagai rekomendasi kedepan untuk perbaikan kegiatan kedepannya adalah peningkatan anggaran untuk diseminasi informasi P4GN.

## 2.

### Sasaran: Meningkatnya daya tangkal keluarga terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika

#### A. Defenisi Operasional

Defenisi operasional indeks ketahanan keluarga adalah tingkat daya tangkal keluarga terhadap terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika. Adapun metode pengukuran IKK adalah pada hasil olah data kuisisioner survei/wawancara kepada responden yang sudah mendapatkan program penyuluhan dari BNN Kabupaten Nganjuk pada tahun 2024

#### B. Metode Pengukuran

Perhitungan Indeks Ketahanan Keluarga terhadap penyalahgunaan menggunakan aplikasi berbasis web milik BNN RI yang dapat diakses melalui alamat : [url:https://www.thetastatistik.com/kuisisioner-indeks-ketahanan-keluarga/](https://www.thetastatistik.com/kuisisioner-indeks-ketahanan-keluarga/). BNN Kabupaten/Kota memilih Desa/Kelurahan kemudian diambil sampel dari keluarga yang telah di intervensi yang terdiri dari anak dan orang tua.

#### C. Analisis Dan Evaluasi Realisasi Kinerja

Sesuai estimasi hasil perhitungan indeks ketahanan keluarga terhadap penyalahgunaan narkoba (Dektara) Direktorat advokasi tahun 2024 telah didapatkan hasil bahwa BNN Kabupaten Nganjuk mendapatkan nilai 90,446 (Sembilan puluh koma empat ratus empat puluh enam) dari target capaian 87,143 (delapan puluh tujuh koma sertus empat puluh tiga) dengan persentase capaian realisasi sebesar 103,7 % (seratus tiga koma tujuh persen) atau kategori “ sangat tinggi” Adapun rangkaian kegiatan yang telah dilaksanakan adalah Pelaksanaan Program Ketahanan Keluarga Anti Narkoba dan Pelaksanaan Penguatan Ketahanan Berbasis Sumberdaya Pembangunan Desa di wilayah Desa Kwagean Kecamatan Loceret dan Desa Kedungdowo Kecamatan Nganjuk Kabupaten Nganjuk.

No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
2	Indeks Ketahanan Keluarga Terhadap Penyalahgunaan Narkoba	87,143	90,446	103 %

Target kinerja Ketahanan Keluarga Terhadap Penyalahgunaan Narkoba mengalami peningkatan dengan yang tertuang dalam Rencana Program Kerja jangka menengah BNNK Nganjuk serta pada Rencana Kinerja Tahunan BNNK Nganjuk, sebagaimana tergambar dalam tabel berikut:

No.	Indikator Kinerja	Target RENPROJA BNNK Nganjuk	Target RKT TA 2024	Target TA 2024
2	Indeks Ketahanan Keluarga Terhadap Penyalahgunaan Narkoba	78	87,143	87,143

Jika dibandingkan dengan pencapaian tahun 2023 mengalami peningkatan Peningkatan tersebut dapat dilihat ditabel dibawah ini :

**Tabel perbandingan Indeks Ketahanan Keluarga (IKK) Terhadap penyalahgunaan narkoba pada tahun 2022-2024**

NO	Tahun	Target	Realisasi	Persentase
1	2020	-	-	-
2	2021	78,67 Indeks	87 Indeks	110 %
3	2022	78,68 Indeks	77,7 Indeks	98,5 %
4	2023	78,69 Indeks	87,143 Indeks	110,74 %
5	2024	87,143 Indeks	90,446 Indeks	103,7 %

Dilihat dari pada tabel perbandingan dari tahun ke tahun, terjadi fluktuatif realisasi dari tahun 2021 sampai tahun 2024. pada tahun 2023 target IKKnya sebesar 78,68 (tujuh puluh delapan koma enam puluh delapan) indeks dan realisasinya sebesar 87,143 indeks dengan persentase 110,74 %. Sedangkan pada tahun 2024 targetnya sebesar 87,143 Indeks dan realisasinya sebesar 90,446 Indeks dengan persentase 103,7 %. Dapat disimpulkan bahwa ada kenaikan dari tahun 2023 ke tahun 2024 dan tahun 2024 terdapat kenaikan pencapaian indeks yang cukup signifikan.

Adapun jika dibandingkan dengan target capaian BNN RI yakni sebesar 86,747 Indeks maka nilai capaian Badan Narkotika Nasional Kabupaten Nganjuk melebihi dari capaian dari capaian target Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia yakni sebesar 90,446 indeks dengan persentase capaian 103,7 %.

#### **D. Faktor Keberhasilan dan kegagalan**

Adapun faktor yang bisa menjadi penyebab kegagalan dalam pelaksanaan kegiatan ini yakni banyaknya kurangnya sarana dan prasaran dari responden dan juga kurang didukung dengan internet yang memadai di wilayah pedesaan sehingga pengisian kuesioner indeks ketahanan keluarga (IKK) menjadi sering terhambat.

Faktor yang menunjang dalam pelaksanaan penyelenggaraan advokasi adalah selain dukungan dari pemerintah Desa Bareng Kecamatan Sawahan dan Pemerintah Kelurahan Payaman Kecamatan Nganjuk Kabupaten Nganjuk yang antusias dalam mendukung dan mendorong penyelenggaraan advokasi dalam Upaya Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) juga ada faktor lain yaitu adanya sumber daya yang kompeten untuk mengerjakan setiap kegiatan masing-masing, serta adanya koordinasi yang kuat antar bidang dan juga pimpinan yang selalu memberikan arahan dalam melaksanakan setiap kegiatan

#### **E. Efisiensi Kinerja Anggaran dan SDM**

BNNK Nganjuk dalam melaksanakan kegiatan ini didukung anggaran sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah ) dan mampu terserap sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah ) atau 100 %. Penyerapan anggaran yang optimal tersebut sebagai komitmen BNNK Nganjuk terhadap Anggaran dari pemerintah yang telah diberikan kepada BNNK Nganjuk untuk melaksanakan kegiatan serta komitmen terhadap RPD yang telah disusun. Dukungan SDM BNNK Nganjuk saat ini sebanyak 32 anggota yang merupakan 43% dari jumlah ideal personel di BNNK. Namun begitu BNNK Nganjuk mampu mengoptimalkan personel yang ada dalam melaksanakan kegiatan. Dari anggaran dan SDM yang tersedia, BNNK Nganjuk pada dasarnya mampu melaksanakan kegiatan dengan baik, terbukti dengan hasil output yang lebih dari 100%.

#### **F. Rekomendasi**

Adapun rekomendasi untuk kegiatan ini yakni mengoptimalkan sumber daya yang ada dalam menangani kegiatan, dan meningkatkan koordinasi, integrasi, serta sinkronisasi kepada seluruh personil Badan Narkotika Nasional Kabupaten Nganjuk.

# 3.

## Sasaran: Meningkatnya kesadaran dan kepedulian masyarakat dalam penanganan P4GN

### A. Defenisi Operasional

Definisi operasional indeks kemandirian partisipasi adalah nilai Tingkat kesadaran dan kepedulian masyarakat yang turut berpartisipasi dalam pelaksanaan P4GN.

### B. Metode Pengukuran

Metode pengukuran indeks Kemandirian Partisipasi (IKP) dari masing-masing instansi/lingkungan adalah pada hasil olah data kuesioner survey/wawancara dengan 6 (enam) indikator kepada responden yang sudah mendapatkan program penyuluhan intervensi dari Badan Narkotika Nasional Kabupaten Nganjuk pada tahun 2024.

Adapun instrumen untuk mengukur indeks tersebut terdiri dari 6 (enam) pertanyaan yang terdiri dari variabel sebagai berikut :

a. SDM

Adanya pelaku/ pelaksana (tokoh dan penggiat anti narkoba) sebagai figur yang biasa menyuarakan, mengajak, dan berbuat pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika (P4GN) di dalam dan diluar lingkungannya.

b. Metode

Adanya metode dalam pelaksanaan pencegahan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika (P4GN) berupa pelatihan, konseling dan pelaksanaan test urine atau kegiatan lainnya yang membawa pesan pencegahan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika (P4GN).

c. Anggaran

Adanya dukungan anggaran pencegahan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba (P4GN) untuk melaksanakan kegiatan pencegahan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba (P4GN) di dalam dan diluar lingkungan masing-masing.

d. Material

Adanya sarana dan prasarana yang diadakan melalui kreativitas dan inovasi untuk mendukung pelaksanaan kegiatan Pencegahan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba di dalam dan diluar lingkungannya.

e. Sistem (Kebijakan).

Adanya sistem, regulasi, aturan mengikat yang digunakan untuk mendukung atau memperkuat pelaksanaan kegiatan pencegahan pemberantasan dan penyalahgunaan narkoba di lingkungannya.

f. Aktivitas

Adanya kegiatan pencegahan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba (P4GN) yang dilaksanakan baik sebelum dan sesudah pembentukan Penggiat Anti Narkoba.

Dari beberapa institusi/ lingkungan yang berada di Kabupaten Nganjuk, yang telah mendapatkan pelatihan dan pembinaan masyarakat anti narkoba 2 (dua) lingkungan yaitu :

1. Lingkungan Pemerintahan : Dinas Kesehatan Kabupaten Nganjuk
2. Lingkungan Masyarakat : Desa Kwagean Kecamatan Loceret  
Desa Kedungdowo Kecamatan Nganjuk.

### **C. Analisis Dan Evaluasi Realisasi Kinerja**

Hasil pengukuran Indeks Kemandirian Partisipasi (IKP) diukur dengan memberikan Kuesioner – kuesioner di lingkungan pemerintahan dan

lingkungan Masyarakat. Perhitungan berdasarkan jawaban dan jawaban tersebut masing-masing memiliki bobot angka yang bervariasi.

No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
3.	Indeks Kemandirian Partisipasi	3,67	3,71	101,1%

Target kinerja Kemandirian Partisipasi mengalami peningkatan dengan yang tertuang dalam Rencana Program Kerja jangka menengah BNNK Nganjuk serta pada Rencana Kinerja Tahunan BNNK Nganjuk, sebagaimana tergambar dalam tabel berikut:

No.	Indikator Kinerja	Target RENPROJA BNNK Nganjuk	Target RKT TA 2024	Target TA 2024
3	Indeks Kemandirian Partisipasi	3,22	3,67	3,67

Jika dibandingkan dengan pencapaian tahun 2021 sampai dengan tahun 2024 terjadi peningkatan realisasi. Peningkatan tersebut dapat dilihat di tabel perbandingan dibawah ini :

NO	Tahun	Target	Realisasi	Persentase
1	2020	-	-	-
2	2021	3,22	3,23	100,3%
3	2022	3,22 Indeks	3,23 Indeks	100,3 %
4	2023	3,25 Indeks	3,67 Indeks	112,9 %
5	2024	3,67 Indeks	3,71 Indeks	101,1 %

Dapat dilihat pada tabel tahun 2023 target indeks kemandirian partisipasi (IKP) sebesar 3,25 (tiga koma dua puluh lima) indeks dan realisasinya sebesar 3,63 (tiga koma enam puluh tiga) indeks dengan persentase 112, 9 % (seratus dua belas koma sembilan persen). Sedangkan tahun 2024 targetnya sebesar

3,67 (tiga koma Enam puluh tujuh) indeks dan realisasinya sebesar 3,71 (tiga koma Tujuh puluh satu ) indeks dengan persentase 101,1 % ( seratus satu koma satu persen). Dapat disimpulkan bahwa terdapat peningkatan pencapaian dari pada tahun 2024 sebesar 0,44 indeks dan juga terdapat peningkatan pada persentasi pada tahun 2024 sebesar 4 % (Empat persen)

#### **D. Faktor Keberhasilan dan kegagalan**

Adapun faktor – faktor yang menghambat dalam melaksanakan kegiatan tersebut yakni, banyaknya tugas-tugas lain yang dikerjakan sehingga penginputan sering terlambat, jumlah sumber daya manusia yang minim sarana dan prasarana yang terbatas, dan cakupan wilayah yang sangat luas.

Factor yang mendukung keberhasilan dalam pencapaian target kegiatan ini adalah karena instansi/ lembaga yang mengikuti kegiatan ini sangat responsif dan partisipatif dalam mendukung pelaksanaan program pencegahan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba di instansi/ Lembaga meraka, seperti terbentuknya penggiat anti narkoba dan pemberdayaan Masyarakat melalui test urine.

Pencapaian kinerja dikarenakan mengacu pada RKAKL dan output kegiatan pada Badan Narkotika Nasioanal Kabupaten Nganjuk yaitu 2 (dua) isntansi/ lingkungan. Sebagai perbaikan kedepan kegiatan pemberdayaan peran serta masyarakat menitik beratkan pada sasaran berdaya guna dan memberikan dampak positif bagi masyarakat.

#### **E. Efisiensi Kinerja Anggaran dan SDM**

BNNK Nganjuk dalam melaksanakan kegiatan ini didukung anggaran sebesar Rp. 143. 785.000,- (seratus empat puluh tiga juta tujuh ratus delapan puluh lima ribu rupiah) dan mampu terserap sebesar Rp. 143. 785.000,- (seratus empat puluh tiga juta tujuh ratus delapan puluh lima ribu rupiah). Penyerapan anggaran yang optimal tersebut sebagai komitmen BNNK Nganjuk terhadap Anggaran dari pemerintah yang telah diberikan kepada BNNK Nganjuk untuk melaksanakan kegiatan serta komitmen terhadap RPD yang telah disusun. Dukungan SDM BNNK Nganjuk saat ini sebanyak

32 anggota yang merupakan 43% dari jumlah ideal personel di BNNK. Namun begitu BNNK Nganjuk mampu mengoptimalkan personel yang ada dalam melaksanakan kegiatan. Dari anggaran dan SDM yang tersedia, BNNK Nganjuk pada dasarnya mampu melaksanakan kegiatan dengan baik, terbukti dengan hasil capaian yang lebih dari 100%.

## F. Rekomendasi

Sebagai rekomendasi ke depan yaitu mengoptimalkan kuesioner-kuesioner yang diberikan kepada penerima manfaat, memantau hasil pengisian kuisisioner, mengoptimalkan sumber daya yang ada dalam menjalankan kegiatan, serta menambahkan sarana dan prasarana di Badan Narkotika Nasional Kabupaten Nganjuk

# 4.

**Sasaran: Meningkatnya upaya pemulihan penyalahguna dan/atau pecandu narkotika**

## A. Defenisi Operasional

Persentase penerima layanan rehabilitasi yang mengalami peningkatan kualitas hidup adalah persentase klien yang mengalami peningkatan kualitas hidupnya setelah mendapatkan layanan rehabilitasi atau intervensi melalui pengukuran dengan menggunakan instrumen WHO Quality Of Life (WHOQoL).

Meningkatnya upaya pemulihan penyalahguna dan/atau pecandu narkotika merupakan sebuah indikator yang digunakan untuk melihat persentase penyalahguna dan/atau pecandu narkotika yang mengalami peningkatan kualitas hidup setelah dilakukan upaya rehabilitasi. Pengukuran ini dilakukan dengan menggunakan kuisisioner *The World Health Organization Quality Of Life* (WHOQOL) versi Indonesia yang merupakan salah satu instrumen untuk mengetahui tingkat kualitas hidup seseorang. WHO menciptakan alat ukur yang terhindar dari emics dan etics dengan cara mengaplikasikan sebuah kuesioner yang sama pada berbagai budaya yang berbeda. Pertanyaan – Pertanyaan dapat

digunakan untuk mengukur kualitas hidup seseorang. Meliputi kesehatan fisik (*physical health*), psikologik (*psychological*), hubungan sosial (social relationship), dan lingkungan (environment). Dari keseluruhan total 24 pertanyaan yang terdiri dari 7 pertanyaan tentang kesehatan fisik, 6 pertanyaan tentang psikologik, 3 pertanyaan dari domain hubungan sosial dan 8 pertanyaan dari domain secara umum dan kesehatan.

## B. Metode Pengukuran

Pengukuran indeks persentase penyalah guna dan/atau pecandu narkotika yang mengalami peningkatan kualitas hidup dilakukan pada klien yang menerima layanan rehabilitasi berkelanjutan atau intervensi dengan membandingkan nilai akhir dan nilai awal WHOQoL. Yang dimaksud dengan peningkatan kualitas hidup adalah hasil nilai akhir WHOQoL lebih besar dibandingkan nilai awal WHOQoL. Persentase diukur dengan membandingkan Jumlah klien yang mengalami peningkatan kualitas hidup dengan jumlah klien yang diukur kualitas hidupnya secara lengkap.

## C. Analisis Dan Evaluasi Realisasi Kinerja

Hasil pengukuran persentase penyalah guna dan/atau pecandu narkotika yang mengalami peningkatan kualitas hidup pada klien yang mendapatkan layanan di Badan Narkotika Nasional Kabupaten Nganjuk baik layanan rehabilitasi rawat jalan maupun layanan pascarehabilitasi. Adapun penghitungan berdasarkan jawaban dan jawaban tersebut masing-masing memiliki bobot angka yang bervariasi. Pengukuran indeks persentase penyalah guna dan/atau pecandu narkotika yang mengalami peningkatan kualitas hidup di BNN Kabupaten Nganjuk melalui metode kuesioner dengan wawancara tatap muka dengan klien. Berikut adalah tabel pencapaian setelah di hitung jumlahnya dalam kurun waktu 1 tahun.

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
4	Persentase penyalah guna dan/atau pecandu narkotika yang mengalami peningkatan kualitas hidup	68 %	91,67 %	134,8 %

Indikator Persentase penyalah guna dan/atau pecandu narkoba yang mengalami peningkatan kualitas hidup merupakan indikator baru yang belum tertuang dalam Rencana Program Kerja jangka menengah BNNK Nganjuk serta pada Rencana Kinerja Tahunan BNNK Nganjuk, sebagaimana tergambar dalam tabel berikut:

No.	Indikator Kinerja	Target RENPROJA BNNK Nganjuk	Target RKT TA 2024	Target TA 2024
4	Persentase penyalah guna dan/atau pecandu narkoba yang mengalami peningkatan kualitas hidup	-	-	68%

#### D. Faktor Keberhasilan dan Kegagalan

Adapun faktor yang mendukung keberhasilan yakni adanya kerjasama dan kekompakan dinatara para pegawai khususnya pada fungsi rehabilitasi yang mau belajar dan upgrade ilmu sehingga mampu menjelaskan maksud dan tujuan kuisisioner kepada klien.

Adapun faktor yang dapat menyebabkan kegagalan pelaksanaan kegiatan tersebut yaitu klien yang cenderung sengaja memberikan nilai tinggi penialain awal dan tidak sesuai dengan kondisi sesungguhnya, karena belum terbentuk kepercayaan seratus persen kepada konselor. Hal ini dapat berpengaruh pada hasil peningkatan Serta adanya klien yang tidak mengikuti kegiatan rehabilitasi sampai selesai sehingga tidak ada pembanding akhir.

#### E. Efisiensi Kinerja Anggaran dan SDM

Dukungan SDM BNNK Nganjuk saat ini sebanyak 32 anggota yang merupakan 43% dari jumlah ideal personel di BNNK. Namun begitu BNNK Nganjuk mampu mengoptimalkan personel yang ada dalam melaksanakan kegiatan. Dari anggaran dan SDM yang tersedia, BNNK Nganjuk pada dasarnya mampu melaksanakan kegiatan dengan baik, terbukti dengan hasil capaian yang optimal yaitu lebih dari 100%

#### F. Rekomendasi

Sebagai rekomendasi kedepan agar dilakukan pelatihan teknis kepada pegawai khususnya pada fungsi rehabilitasi supaya dalam pelaksanaan pengisian kuisioner mendapatkan hasil sesuai dengan yang diharapkan.

## 5. Sasaran: Meningkatnya kapasitas tenaga teknis rehabilitasi

### A. Defenisi Operasional

Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM) adalah intervensi di bidang rehabilitasi terhadap penyalahguna narkoba yang dirancang dari masyarakat, oleh masyarakat dan untuk masyarakat melalui agen pemulihan dengan memanfaatkan fasilitas dan potensi masyarakat sesuai dengan kearifan lokal. Agen Pemulihan melakukan pendekatan rehabilitasi dalam bentuk sederhana dengan ambang batas rendah (*low threshold*), yang berarti layanan tersebut mudah diakses dan tidak membutuhkan persyaratan untuk terlibat didalamnya.

### B. Metode Pengukuran

Metode pengukuran yang digunakan adalah jumlah petugas penyelenggaraan layanan IBM terlatih melalui kegiatan Bimbingan Teknis Petugas Agen Pemulihan yang dilakukan oleh Fungsi Rehabilitasi BNNK Nganjuk.

### C. Analisis Dan Evaluasi Realisasi Kinerja

Adanya agen pemulihan yang terlatih dan melaksanakan kegiatan IBM pada desa yang telah ditetapkan menjadi lokasi IBM. Fungsi rehabilitasi Badan Narkotika Nasional Kabupaten Nganjuk mendapatkan target 10 orang petugas

penyelenggaraan layanan IBM terlatih dan tercapai 10 orang dengan persentase 100 %.

No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
5.	Jumlah petugas penyelenggara layanan IBM yang terlatih	10	10	100%

Indikator Jumlah petugas penyelenggara layanan IBM yang terlatih merupakan indikator baru yang belum tertuang dalam Rencana Program Kerja jangka menengah BNNK Nganjuk serta pada Rencana Kinerja Tahunan BNNK Nganjuk, sebagaimana tergambar dalam tabel berikut:

No.	Indikator Kinerja	Target RENPROJA BNNK Nganjuk	Target RKT TA 2024	Target TA 2024
5	Jumlah petugas penyelenggara layanan IBM yang terlatih	-	10	10 orang

Jika dibandingkan dengan pencapaian tahun 2022 terdapat peningkatan pada target petugas terlatih dari target 5 orang menjadi 10 orang, namun indeks tersebut belum tertuang dalam penetapan kinerja tahun 2022. Jika dibandingkan tahun 2023, tidak ada peningkatan pencapaian namun target tercapai. Pencapaian tersebut dapat dilihat ditabel perbandingan dibawah ini :

No	Tahun	Target	Realisasi	Persentase
1	2020	-	-	-
2	2021	-	-	-
3	2022	-	-	-
4	2023	10 Orang	10 Orang	100%
5	2024	10 Orang	10 Orang	100%

#### D. Faktor Keberhasilan dan Kegagalan

Faktor penunjang keberhasilan terkait kegiatan petugas yang terlatih adalah adanya peran aktif dari anggota agen pemulihan untuk mengikuti kegiatan Bimbingan

Teknis dan peran dari aparat desa untuk selalu mendukung kegiatan bimbingan teknis IBM.

Faktor Penghambat yang dapat menyebabkan kegagalan dalam pelaksanaan kegiatan tersebut adalah sebagai berikut :

1. Pada pelaksanaan Bimbingan Teknis kesulitan dalam menyesuaikan jadwal antar Agen Pemulihan.

#### **E. Efisiensi Kinerja Anggaran dan SDM**

BNNK Nganjuk dalam melaksanakan kegiatan ini didukung anggaran sebesar Rp. 14.890.000,- dan mampu terserap sebesar Rp. 14.890.000,- atau 100%. Penyerapan anggaran yang optimal tersebut sebagai komitmen BNNK Nganjuk terhadap Anggaran dari pemerintah yang telah diberikan kepada BNNK Nganjuk untuk melaksanakan kegiatan serta komitmen terhadap RPD yang telah disusun. Dukungan SDM BNNK Nganjuk saat ini sebanyak 33 anggota yang merupakan 44% dari jumlah ideal personel di BNNK. Namun begitu BNNK Nganjuk mampu mengoptimalkan personel yang ada dalam melaksanakan kegiatan. Dari anggaran dan SDM yang tersedia, BNNK Nganjuk pada dasarnya mampu melaksanakan kegiatan dengan baik, terbukti dengan hasil capaian yang optimal yaitu 100%.

#### **F. Rekomendasi**

Sebagai rekomendasi kedepan yang diperlukan adalah :

1. Mengoptimalkan sumber daya yang ada dalam menangani kegiatan.
2. Meningkatkan koordinasi, integrasi, serta sinkronisasi kepada seluruh stakeholder dalam mendukung pelaksanaan kegiatan IBM.

## **6.**

**Sasaran: Meningkatnya aksesibilitas dan kemampuan fasilitas layanan rehabilitasi narkotika**

#### **A. Defenisi Operasional**

Dalam pelaksanaan kegiatan rehabilitasi rawat jalan maka memerlukan tenaga untuk dapat memberikan pendampingan kepada para penyalahguna narkoba untuk bisa maksimal. Setelah adanya peningkatan kemampuan maka lembaga harus melaksanakan layanan yang menjadi tugas pokoknya. Adanya layanan inilah yang menjadi dasar sebuah lembaga rehabilitasi dikatakan operasional.

## B. Metode Pengukuran

Metode pengukurannya dilakukan dengan cara mendata jumlah unit yang telah terbentuk dan mampu menyelenggarakan layanan rehabilitasi korban penyalahgunaan dan/atau pecandu narkoba dalam satu tahun anggaran.

## C. Analisis Dan Evaluasi Realisasi Kinerja

Dalam pengukuran lembaga yang operasional adalah melihat adanya data tentang layanan rehabilitasi yang dilaksanakan dalam kurun waktu satu tahun anggaran

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
6.	Jumlah lembaga rehabilitasi yang operasional	1	1	100%

Indikator kinerja Jumlah lembaga rehabilitasi yang operasional tidak mengalami peningkatan dengan yang tertuang dalam Rencana Program Kerja jangka menengah BNNK Nganjuk serta pada Rencana Kinerja Tahunan BNNK Nganjuk, sebagaimana tergambar dalam tabel berikut:

No.	Indikator Kinerja	Target RENPROJA BNNK Nganjuk	Target RKT TA 2024	Target TA 2024
6	Jumlah lembaga rehabilitasi yang operasional	1	1	1

Jika dibandingkan dengan pencapaian tahun 2021 sampai dengan tahun 2024 tidak ada perubahan target dan realisasi. Hal tersebut dapat dilihat di tabel perbandingan dibawah ini :

No	Tahun	Target	Realisasi	Persentase
1	2020	-	-	-

2	2021	1 Unit	1 Unit	100,00 %
3	2022	1 Unit	1 Unit	100,00 %
4	2023	1 Unit	1 Unit	100,00 %
5	2024	1 Unit	1 Unit	100,00%

#### **D. Faktor Keberhasilan Dan Kegagalan**

Bahwa dalam pelaksanaan rehabilitasi lembaga yang operasional di BNNK Nganjuk hanya 1 lembaga yaitu klinik pratama BNNK Nganjuk, untuk lembaga diluar BNNK Nganjuk sementara belum bekerjasama dengan BNNK Nganjuk.

Faktor keberhasilan dalam kegiatan ini adalah selalu adanya layanan yang tersedia untuk pelaksanaan rehabilitasi bagi masyarakat yang membutuhkan.

#### **E. Efisiensi Kinerja Anggaran dan SDM**

BNNK Nganjuk dalam melaksanakan kegiatan ini didukung anggaran sebesar Rp. 4.060.000,- dan mampu terserap sebesar Rp. 4.060.000,- atau 99,99%. Penyerapan anggaran yang optimal tersebut sebagai komitmen BNNK Nganjuk terhadap Anggaran dari pemerintah yang telah diberikan kepada BNNK Nganjuk untuk melaksanakan kegiatan serta komitmen terhadap RPD yang telah disusun. Dukungan SDM BNNK Nganjuk saat ini sebanyak 32 anggota yang merupakan 43% dari jumlah ideal personel di BNNK. Namun begitu BNNK Nganjuk mampu mengoptimalkan personel yang ada dalam melaksanakan kegiatan. Dari anggaran dan SDM yang tersedia, BNNK Nganjuk pada dasarnya mampu melaksanakan kegiatan dengan baik, terbukti dengan hasil capaian yang optimal yaitu 100%.

#### **F. Rekomendasi**

BNN Kabupaten Nganjuk akan selalu berusaha secara maksimal untuk melakukan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat yang membutuhkan layanan rehabilitasi rawat jalan.

# 7.

## Sasaran: Meningkatnya aksesibilitas dan kemampuan fasilitas layanan rehabilitasi narkotika

### A. Defenisi Operasional

Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM) adalah intervensi di bidang rehabilitasi terhadap penyalahguna narkoba yang dirancang dari masyarakat, oleh masyarakat dan untuk masyarakat melalui agen pemulihan dengan memanfaatkan fasilitas dan potensi masyarakat sesuai dengan kearifan lokal. IBM melakukan pendekatan rehabilitasi dalam bentuk sederhana dengan ambang batas rendah (*low threshold*), yang berarti layanan tersebut mudah diakses dan tidak membutuhkan persyaratan untuk terlibat didalamnya.

### B. Metode Pengukuran

Metode pengukurannya dilakukan dengan cara mendata jumlah unit penyelenggara layanan intervensi berbasis masyarakat yang telah terbentuk dan mampu menyelenggarakan layanan pendampingan dan pemberian dukungan pemulihan hingga bimbingan lanjut bagi penyalah guna, korban penyalahgunaan dan/atau pecandu narkotika dilingkungannya dalam satu tahun anggaran.

### C. Analisis Dan Evaluasi Realisasi Kinerja

Dalam menentukan tercapai atau tidaknya indikator kinerja jumlah unit penyelenggara layanan rehabilitasi Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM), dapat diukur dengan mengidentifikasi apakah layanan IBM tersebut telah beroperasi sesuai SOP yang telah ditentukan.

Kegiatan IBM dilakukan oleh Agen Pemulihan (AP) yang merupakan warga masyarakat yang tinggal didesa/kelurahan yang terpilih sebagai mitra kerja BNN, untuk Badan Narkotika Nasional Kabupaten Ngajuk terdapat 2 (satu) desa yang memiliki unit penyelenggara layanan rehabilitasi IBM yakni di Desa Kedungdowo Kecamatan Ngajuk dan Desa Kwagean Kecamatan Loceret.

Unit IBM di Desa Kedungdowo Kecamatan Nganjuk dan Desa Kwagean Kecamatan Loceret tersebut sudah beroperasi dengan baik dengan demikian target unit penyelenggara layanan rehabilitasi IBM Badan Narkotika Nasional Kabupaten Nganjuk dapat terealisasi sesuai dengan target.

No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
7.	Jumlah unit penyelenggara layanan rehabilitasi IBM yang operasional	2	2	100%

Indikator kinerja Jumlah unit penyelenggara layanan rehabilitasi IBM yang operasional mengalami peningkatan dengan yang tertuang dalam Rencana Program Kerja jangka menengah BNNK Nganjuk serta pada Rencana Kinerja Tahunan BNNK Nganjuk, sebagaimana tergambar dalam tabel berikut:

No.	Indikator Kinerja	Target RENPROJA BNNK Nganjuk	Target RKT TA 2024	Target TA 2024
7	Jumlah lembaga rehabilitasi yang operasional	1	2	2

Jika dibandingkan dengan pencapaian tahun 2021 dan 2022 kondisi tersebut secara persentase pencapaian tidak terjadi perubahan akan tetapi secara target dan realisasi terjadi peningkatan. Sementara dibandingkan dengan pencapaian tahun di 2023, pencapaian di tahun 2024 sama, yaitu tercapai secara jumlah dan presentase. Pencapaian tersebut dapat dilihat ditabel perbandingan dibawah ini :

No	Tahun	Target	Realisasi	Persentase
1	2020	-	-	-
2	2021	1 Unit	1 Unit	100,00 %
3	2022	1 Unit	1 Unit	100,00 %
4	2023	2 Unit	2 Unit	100,00 %
5	2024	2 Unit	2 Unit	100,00%

#### **D. Faktor Keberhasilan dan Kegagalan**

Adapun permasalahan dan hambatan yakni masih kurangnya kesadaran pecandu untuk ikut serta dalam kegiatan IBM sehingga layanan IBM mengalami kemunduran pelaksanaan dan tidak sesuai timeline awal. Selain itu, terdapat warga di sekitar lingkungan tempat tinggal klien di salah satu IBM yang tertangkap, sehingga klien sempat ingin berhenti ikut layanan ditengah-tengah program.

Faktor penunjang keberhasilan untuk kegiatan Intervensi Berbasis Masyarakat yaitu dukungan dari aparat desa baik berupa dukungan tempat, moril, dan materi berupa dana desa yang diperuntukan bagi transport klien. Selain itu, tim rehabilitasi Badan Narkotika Nasional Kabupaten Nganjuk yang selalu siap melaksanakan kegiatan walaupun diluar jam kerja.

#### **E. Efisiensi Kinerja Anggaran dan SDM**

BNNK Nganjuk dalam melaksanakan kegiatan ini didukung anggaran sebesar Rp. 29.330.000,- dan mampu terserap sebesar Rp. 29.330.000,- atau 100,00%. Penyerapan anggaran yang optimal tersebut sebagai komitmen BNNK Nganjuk terhadap Anggaran dari pemerintah yang telah diberikan kepada BNNK Nganjuk untuk melaksanakan kegiatan serta komitmen terhadap RPD yang telah disusun. Dukungan SDM BNNK Nganjuk saat ini sebanyak 33 anggota yang merupakan 44% dari jumlah ideal personel di BNNK. Namun begitu BNNK Nganjuk mampu mengoptimalkan personel yang ada dalam melaksanakan kegiatan. Dari anggaran dan SDM yang tersedia, BNNK Nganjuk pada dasarnya mampu melaksanakan kegiatan dengan baik, terbukti dengan hasil capaian yang optimal yaitu 100%.

#### **F. Rekomendasi**

Sebagai rekomendasi kedepan yang diperlukan yakni Perlu adanya komitmen yang kuat dari Pemerintah, Dinas/Instansi terkait serta masyarakat guna mendukung keberhasilan program IBM ini salah satunya dengan membuat regulasi terkait penggunaan anggaran di Desa untuk mendukung kegiatan P4GN. Selain itu perlunya sosialisasi tentang program rehabilitasi yang lebih luas kepada masyarakat agar tumbuh pemahaman dan kesadaran untuk lebih peduli dengan permasalahan

serta betapa pentingnya rehabilitasi bagi korban penyalahguna dan pecandu narkoba.

## 8.

### Sasaran: Meningkatnya kualitas layanan rehabilitasi narkoba

#### A. Defenisi Operasional

Indeks kepuasan penerima layanan merupakan suatu cara untuk mengukur tingkat kepuasan penerima layanan terhadap layanan rehabilitasi yang dilakukan setelah selesai menerima pelayanan dengan melihat pada 9 (sembilan) indikator : (1) persyaratan, (2) prosedur, (3) waktu pelayanan, (4) biaya/tarif, (5) produk spesifikasi jenis pelayanan, (6) kompetensi pelaksana, (7) perilaku pelaksana, (8) maklumat pelayanan, dan (9) pelayanan pengaduan, saran dan masukan

Indeks kepuasan masyarakat (IKM) penerima layanan rehabilitasi bertujuan untuk mengukur kepuasan masyarakat sebagai pengguna layanan yang akan menjadi dasar penyusunan kebijakan rehabilitasi guna meningkatkan kualitas layanan bagi orang dengan gangguan penggunaan Zat (*substance use disorder*) yang dilaksanakan oleh Fungsi Rehabilitasi BNN Kabupaten Nganjuk.

#### B. Metode Pengukuran

Pengukuran indeks kepuasan layanan rehabilitasi dilakukan melalui survei kepada residen, keluarga residen, dan masyarakat sekitar tempat layanan rehabilitasi dengan instrumen kuisisioner kepuasan layanan yang mengacu pada aturan yang berlaku yakni KepMenPan Nomor : KEP/25/M.PAN/2/2004 tentang Pedoman Umum Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah yang didalamnya ada instrumen kuisisioner kepuasan layanan.

#### C. Analisis Dan Evaluasi Realisasi Kinerja

Hasil pengukuran Kepuasan Layanan Klinik Rehabilitasi diukur dari dengan memberikan kuisisioner – kuisisioner survei pada masyarakat yang mendapatkan layanan rawat jalan. Adapun penghitungan berdasarkan jawaban dan jawaban tersebut masing-masing memiliki bobot angka yang bervariasi.

No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
8.	Indeks Kepuasan Penerima Layanan Rehabilitasi Pada Fasilitas Rehabilitasi BNN	3,60	3,56	98,8%

Pengukuran indeks kepuasan penerima layanan rehabilitasi di BNN Kabupaten Nganjuk melalui metode kuesioner dengan wawancara tatap muka, kuisisioner melalui



pengisian sendiri, dan Kuisisioner elektronik (internet/e-survey) sebagaimana gambar berikut:

Indikator kinerja Indeks Kepuasan Penerima Layanan Rehabilitasi Pada Fasilitas Rehabilitasi BNN mengalami perubahan dengan yang tertuang dalam Rencana Program Kerja jangka menengah BNNK Nganjuk serta pada Rencana Kinerja Tahunan BNNK Nganjuk, sebagaimana tergambar dalam tabel berikut:

No.	Indikator Kinerja	Target RENPROJA BNNK Nganjuk	Target RKT TA 2024	Target TA 2024
8	Indeks Kepuasan Penerima Layanan Rehabilitasi Pada Fasilitas Rehabilitasi BNN	3,2	3.60	3,60

Jika dibandingkan dengan pencapaian tahun 2021 dan 2022 terdapat kenaikan realisasi dan persentase pencapaian. Namun jika dibandingkan pencapaian tahun 2023, pencapaian di tahun 2024 ini mengalami penurunan. Hal ini dikarenakan ada perbedaan cara perhitungan dibandingkan tahun sebelumnya. Pencapaian tersebut dapat dilihat ditabel perbandingan dibawah ini :

No	Tahun	Target	Realisasi	Persentase
1	2020	-	-	-
2	2021	3,2 indeks	3,1 indeks	97 %
3	2022	3,20 indeks	3,41 indeks	106,56 %
4	2023	3,30 indeks	3,72 indeks	107 %
5	2024	3,60 indeks	3,56 indeks	98,8%

#### D. Faktor Keberhasilan dan Kegagalan

Faktor keberhasilan BNNK Nganjuk ialah kinerja petugas dari BNNK Nganjuk memberikan pelayan yang maksimal dalam pelaksanaan rehabilitasi rawat jalan. Namun pelayan tetap berorientasi bahwa pelayanan bagus namun output dari layanan agar klien bisa pulih dan produktif tetap selalu diperhatikan.

Faktor yang mungkin bisa menyebabkan kegagalan yaitu klien sulit memahami skala penilaian jadi harus mendapatkan pendampingan dari konselor. Disamping itu, pola perhitungan yang berbeda juga turut memberikan hasil berbeda dibanding tahun sebelumnya.

#### E. Efisiensi Kinerja Anggaran dan SDM

Dukungan SDM BNNK Nganjuk saat ini sebanyak 32 anggota yang merupakan 43% dari jumlah ideal personel di BNNK. Namun begitu BNNK Nganjuk mampu mengoptimalkan personel yang ada dalam melaksanakan kegiatan. Dari anggaran dan SDM yang tersedia, BNNK Nganjuk pada dasarnya mampu melaksanakan kegiatan dengan baik, terbukti dengan hasil capaian yang optimal yaitu lebih dari 100%.

## F. Rekomendasi

Petugas rehabilitasi selalu meningkatkan kemampuan dalam pelaksanaan rehabilitasi serta selalu memberikan pelayanan maksimal kepada penerima layanan.

# 9.

## Sasaran: Meningkatnya proses manajemen kinerja secara efektif dan efisien

### A. Defenisi Operasional

Nilai Kinerja Anggaran (NKA) adalah proses untuk melakukan pengukuran, penilaian, dan analisis atas Kinerja Anggaran tahun anggaran berjalan dan tahun anggaran sebelumnya untuk menyusun rekomendasi dalam rangka peningkatan Kinerja Anggaran.

### B. Metode Pengukuran

Metode pengukurannya NKA BNNK Nganjuk yaitu dengan mengambil nilai aspek implementasi tahun 2024 diambil dari pada Aplikasi Kementerian Keuangan yakni SMART DJA (Sistem monitoring dan evaluasi kinerja terpadu) meliputi substansi penyerapan anggaran, konsistensi atas rencana penarikan dana, capaian output dan efisiensi.

### C. Analisis dan Evaluasi Realisasi

Nilai NKA BNNK Nganjuk berasal dari penghitungan oleh aplikasi dari kementerian keuangan yaitu SMART DJA yang menampilkan pencapaian kinerja anggaran BNN Kabupaten Nganjuk. Aplikasi tersebut secara otomatis menghitung progress pencapaian kinerja dan persentase progress kegiatan yang sementara dilaksanakan atau telah dilaksanakan.

Kinerja Anggaran Badan Narkotika Nasional Kabupaten Nganjuk dinilai berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 22/PMK.02/2021 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran atas pelaksanaan rencana kerja dan anggaran kementerian negara/lembaga.

Adapun hasil yang diperoleh Badan Narkotika Nasional Kabupaten Nganjuk tahun anggaran 2024 adalah Dengan kategori “**Sangat Baik**”.

No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
9.	Nilai Kinerja Anggaran BNN Kabupaten/Kota	89	100	112,3%

Indikator Nilai Kinerja Anggaran BNN Kabupaten/Kota mengalami perubahan dengan yang tertuang dalam Rencana Program Kerja jangka menengah BNNK Nganjuk serta pada Rencana Kinerja Tahunan BNNK Nganjuk, sebagaimana tergambar dalam tabel berikut:

No.	Indikator Kinerja	Target RENPROJA BNNK Nganjuk	Target RKT TA 2024	Target TA 2024
9	Nilai Kinerja Anggaran BNN Kabupaten/Kota	87	89	89

Jika dibandingkan dengan pencapaian tahun sebelumnya ada peningkatan dalam pencapaian realisasi maupun persentase dari target. Pencapaian tersebut dapat dilihat ditabel perbandingan dibawah ini :

No	Tahun	Target	Realisasi	Persentase
1	2020	88	86,45	99%
2	2021	90	85,91	98%
3	2022	87	86,45	99%
4	2023	87	88,58	101,8%
5	2024	89	100	112,3 %

Nilai yang tertuang dalam tabel tersebut di atas sebagai perbandingan nilai NKA BNNK Nganjuk selama 5 tahun terakhir. Secara umum BNNK Nganjuk melaksanakan tugas secara maksimal sesuai petunjuk dan teknis yang telah diberikan oleh Biro Keuangan BNN RI dan KPPN kediri.

The screenshot displays the 'MONEV' application interface for 'BADAN NARKOTIKA NASIONAL KABUPATEN NGANJUK'. The main section is titled 'Nilai Kinerja Anggaran Satuan Kerja'. It features a table with the following data:

No.	Kode Satuan Kerja	Satuan Kerja	NK Perencanaan Anggaran	NK Pelaksanaan Anggaran	Nilai Kinerja Anggaran
1	021850	BADAN NARKOTIKA NASIONAL KABUPATEN NGANJUK	100,00	100,00	100,00

Additional interface elements include a search bar, a 'Download Excel' button, and pagination controls showing 'Menampilkan 1 sampai 1 dari 1 entri'.

#### D. Faktor Keberhasilan dan Kegagalan

Faktor yang menunjang keberhasilan diraihinya nilai NKA BNNK Nganjuk yaitu adanya kerjasama dari seluruh pegawai dalam melaksanakan kegiatannya sesuai RPD dan timeline yang telah dibuat pada awal tahun. Kepala BNNK Nganjuk beserta jajaran rutin melaksanakan evaluasi penyerapan anggaran dan kinerja demi mempertahankan kinerja yang maksimal.

Kendala yang bisa menyebabkan kegagalan adalah adanya Blokir Anggaran Belanja perjalanan dinas pada triwulan 4 yang menyebabkan mengganggu RPD yang telah dibuat. kurangnya jumlah pegawai yang belum sesuai dengan DSP yang seharusnya, sehingga menyebabkan pegawai memiliki tanggung jawab pekerjaan yang tidak sesuai dengan jabatan karena harus merangkap beberapa tugas atau pekerjaan lainnya yang menyebabkan kurang fokus terhadap pekerjaan.

#### E. Efisiensi kinerja anggaran dan SDM

BNNK Nganjuk dalam melaksanakan kegiatan ini didukung anggaran sebesar Rp. 6.562.000,- dan mampu terserap sebesar Rp. 6.562.000,- atau 100%. Penyerapan anggaran yang optimal tersebut sebagai komitmen BNNK Nganjuk terhadap Anggaran dari pemerintah yang telah diberikan kepada BNNK Nganjuk untuk melaksanakan kegiatan serta komitmen terhadap RPD yang telah disusun.

Dukungan SDM BNNK Nganjuk saat ini sebanyak 32 anggota yang merupakan 43% dari jumlah ideal personel di BNNK. Namun begitu BNNK Nganjuk mampu mengoptimalkan personel yang ada dalam melaksanakan kegiatan. Dari anggaran dan SDM yang tersedia, BNNK Nganjuk pada dasarnya mampu melaksanakan kegiatan dengan baik, terbukti dengan hasil capaian yang .

## F. Rekomendasi

Sebagai rekomendasi dan strategi untuk mengatasi masalah tersebut adalah dengan meningkatkan kapasitas pegawai yang ada untuk pelatihan dan bimbingan teknis yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsinya, menerapkan kebijakan dinamisasi dan optimalisasi. Koordinasi antar seksi dan subbag ditingkatkan lagi untuk menghadapi hambatan dan permasalahan kinerja dan penyerapan anggaran. DSP pegawai diharapkan untuk segera dilengkapi demi fokus pegawai BNNK Nganjuk sesuai dengan tugas pokok fungsinya.

# 10. Sasaran: Meningkatnya tata kelola administrasi keuangan yang sesuai prosedur

No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
10.	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) BNN Kabupaten/Kota	100	100	100%

### A. Defenisi Operasional

Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) adalah indikator yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan selaku BUN untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga. IKPA digunakan sebagai alat monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan anggaran yang disediakan oleh Ditjen Perbendaharaan yang terintegrasi pada Online Monitoring (OM) SPAN yang dijadikan ukuran dan mencerminkan kinerja satuan kerja atas kualitas perencanaan anggaran, kualitas pelaksanaan anggaran, serta kualitas hasil pelaksanaan anggaran.

## B. Metode Pengukuran

Berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-5/PB/2022, Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) adalah indikator yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan selaku BUN untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga dari sisi kualitas implementasi perencanaan anggaran, kualitas pelaksanaan anggaran, dan kualitas hasil pelaksanaan anggaran. Pada prinsipnya, penilaian IKPA diberlakukan untuk kinerja pelaksanaan anggaran satu tahun anggaran penuh. ASpek yang dinilai dalam penilaian IKPA yaitu: kualitas perencanaan anggaran, kualitas pelaksanaan anggaran dan kualitas hasil pelaksanaan anggaran.

## C. Analisis dan Evaluasi Realisasi

Hasil penilaian IKPA BNNK Nganjuk tahun 2024 mampu memperoleh nilai maksimal yaitu 100 sesuai dengan tabel berikut ini.



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
BADAN NARKOTIKA NASIONAL KABUPATEN NGANJUK

### INDIKATOR PELAKSANAAN ANGGARAN

Sampai Dengan : DESEMBER

No	Kode KPPN	Kode BA	Kode Satker	Uraian Satker	Keterangan	Kualitas Perencanaan Anggaran		Kualitas Pelaksanaan Anggaran				Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran	Nilai Total	Konversi Bobot	Dispensasi SPM (Pengurang)	Nilai Akhir (Nilai Total/Konversi Bobot)
						Revisi DIPA	Deviasi Halaman III DIPA	Penyerapan Anggaran	Belanja Kontraktual	Penyelesaian Tagihan	Pengelolaan UP dan TUP	Capaian Output				
1	034	066	682850	BADAN NARKOTIKA NASIONAL KABUPATEN NGANJUK	Nilai	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	100.00	100.00	80.00	80%	0.00	100.00
					Bobot	10	15	20	0	0	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	15.00	20.00	0.00	0.00	10.00	25.00				
					Nilai Aspek	100.00		100.00			100.00					

Indikator Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) BNN Kabupaten/Kota mengalami perubahan dengan yang tertuang dalam Rencana Program Kerja jangka menengah BNNK Nganjuk serta pada Rencana Kinerja Tahunan BNNK Nganjuk, sebagaimana tergambar dalam tabel berikut:

No.	Indikator Kinerja	Target RENPROJA BNNK Nganjuk	Target RKT TA 2024	Target TA 2024
10	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) BNN Kabupaten/Kota	94	100	100

Jika dibandingkan dengan pencapaian tahun sebelumnya mampu mempertahankan pencapaiannya. Pencapaian tersebut dapat dilihat ditabel perbandingan dibawah

No	Tahun	Target	Realisasi	Persentase
1	2020	-	-	-
2	2021	94	98,28	105%
3	2022	95	98,59	103%
4	2023	92	100	108,69%
5	2024	100	100	100%

Dari tabel dapat dilihat peningkatan pencapaian IKPA di tahun 2024 dari realisasi mampu mempertahankan nilai 100. Hal tersebut memberikan gambaran bahwan BNNK Nganjuk mampu melaksanakan Kinerja Pelaksanaan Anggaran secara maksimal.

#### **D. Faktor Keberhasilan dan Kegagalan**

Faktor yang menunjang diraihnya nilai IKPA BNNK Nganjuk secara maksimal yaitu:

- Komitmen dan kerjasama antar seksi serta seluruh pegawai dalam melaksanakan kegiatannya sesuai RPD dan timeline yang telah dibuat pada awal tahun.
- Kepala BNNK Nganjuk beserta jajaran rutin melaksanakan evaluasi penyerapan anggaran dan kinerja demi mempertahankan kinerja yang maksimal.

Kendala yang dihadapi dalam melaksanakan indicator kinerja pelaksanaan anggaran adalah:

- Adanya bentrok jadwal revisi halaman III DIPA dengan revisi tingkat DJA, hal ini menyebabkan kesulitan bagi BNNK Nganjuk saat merumuskan revisi halaman III DIPA.
- Adanya pagu blokir perjalanan dinas yang mengganggu Rencana penarikan dana di triwulan IV.
- Jumlah pegawai yang belum sesuai dengan DSP yang seharusnya, sehingga menyebabkan pegawai memiliki tanggung jawab pekerjaan yang bercabang karena harus merangkap beberapa tugas atau pekerjaan lainnya sehingga menyebabkan kurang fokus terhadap pekerjaan.

## E. Faktor yang menunjang

BNNK Nganjuk dalam melaksanakan kegiatan ini didukung anggaran sebesar Rp. 53.760.000,- dan mampu terserap sebesar Rp. 53.760.000,- atau 100%. Penyerapan anggaran yang optimal tersebut sebagai komitmen BNNK Nganjuk terhadap Anggaran dari pemerintah yang telah diberikan kepada BNNK Nganjuk untuk melaksanakan kegiatan serta komitmen terhadap RPD yang telah disusun. Dukungan SDM BNNK Nganjuk saat ini sebanyak 32 anggota yang merupakan 43% dari jumlah ideal personel di BNNK. Namun begitu BNNK Nganjuk mampu mengoptimalkan personel yang ada dalam melaksanakan kegiatan. Dari anggaran dan SDM yang tersedia, BNNK Nganjuk pada dasarnya mampu melaksanakan kegiatan dengan baik, terbukti dengan hasil capaian yang optimal yaitu 100%.

## F. Rekomendasi

Sebagai rekomendasi dan strategi untuk mengatasi masalah tersebut adalah dengan meningkatkan koordinasi antar seksi dan subbag ditingkatkan lagi untuk menghadapi hambatan dan permasalahan kinerja dan penyerapan anggaran. DSP pegawai diharapkan untuk segera dilengkapi demi fokus pegawai BNNK Nganjuk sesuai dengan tugas pokok fungsinya. Kepastian dalam penyusunan anggaran juga sangat berpengaruh terhadap strategi satker dalam menyusun RPD dan rencana kegiatan.

## B. Akuntabilitas Keuangan

Tahun 2024 BNN Kabupaten Nganjuk beberapa kali mengalami perubahan anggaran, dikarenakan pada tahun tersebut ada penambahan anggaran dari BNN pusat dan Revisi PNBPN sebagaimana terlampir:

No	uraian	Nominal	Keterangan
1	Anggaran awal	Rp. 1,938,275,000	
2	Revisi 1	Rp. 1,770,810,000	Penghapusan anggaran blokir

Anggaran terakhir BNNK Nganjuk Tahun 2024 sebesar **Rp. 1.770.810.000,-** dan realisasi anggaran sebesar **Rp. 1.770.229.644,-** atau sebesar **100%**. Dari

anggaran tersebut terdiri dari belanja modal dan belanja barang dengan rincian sebagai berikut:

NO	PROGRAM	PAGU	REALISASI	PERSEN
1	Belanja Barang	Rp. 1.737.810.000	Rp 1.737.229.894	100 %
2	Belanja Modal	Rp. 33.000.000	Rp. 32.999.750	100 %

Dari anggaran yang tersedia di BNNK Nganjuk terbagi menjadi 2 program yaitu Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) dengan anggaran sebesar **Rp. 485.223.000,-** serta program Program Dukungan Manajemen dengan anggaran sebesar **Rp. 1.299.171.000,-** .

## **BAB IV PENUTUP**

Laporan akuntabilitas Kinerja Badan Narkotika Nasional Kabupaten Nganjuk Tahun 2024 merupakan perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, kebijakan, program, dan kegiatan BNN Kabupaten Nganjuk sebagai pelayanan publik. Secara umum dapat disimpulkan bahwa BNN Kabupaten Nganjuk telah dapat merealisasikan berbagai capaian melalui implementasi Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba sebagaimana yang ditetapkan dalam Penetapan Kinerja, untuk mencapai tahapan pembangunan jangka menengah tahun 2020-2024. Tugas mulia yang diemban BNN Kabupaten Nganjuk adalah mewujudkan masyarakat Kabupaten Nganjuk bebas dari bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, tugas tersebut merupakan pekerjaan besar yang mustahil mampu dilakukan oleh BNN sendiri. Peran serta masyarakat secara aktif yang didukung kesungguhan jajaran penyelenggara negara dan penegak hukum, baik di tingkat pusat maupun daerah, merupakan syarat mutlak untuk mewujudkan harapan tersebut.

Melihat hasil capaian output dan outcome BNNK Nganjuk yang mampu melebihi target, dapat disimpulkan bahwa BNNK Nganjuk mampu memaksimalkan SDM dan anggaran tahun 2024. Kendala terbatasnya jumlah pegawai yang belum memenuhi DSP serta anggaran yang terbatas tidak menjadi halangan BNNK Nganjuk dalam melaksanakan Tugas Pokok dan fungsinya di tahun 2024.

Secara kualitas capaian kinerja BNN Kabupaten Nganjuk tahun 2024, sudah lebih meningkat dibanding dengan Tahun 2023 dilihat dari beberapa capaian target kinerja yang telah ditetapkan, kenaikan kualitas kinerja dipengaruhi tingkat kematangan secara organisasi dan Sumber Daya Manusia. BNNK Nganjuk berupaya untuk mempertahankan dan meningkatkan apa yang telah di capai di tahun ini dengan strategi yang telah di tetapkan yaitu menggandeng stakeholder terkait untuk lebih tanggap dan turut aktif dalam pelaksanaan P4GN di wilayah kabupaten nganjuk. Secara lokasi kabupaten nganjuk merupakan daerah penghubung kota kota besar di wilayah jawa timur seperti madiun dan kediri yang menjadi sasaran utama peredaran narkoba. BNNK Nganjuk berupaya untuk memutus tali distribusi peredaran narkoba dengan membatasi gerak serta memutus tali distribusi jaringan narkoba di wilayah jawa timur bagian barat.

Sangat disadari bahwa Laporan Akutabilitas ini belum sempurna seperti yang diharapkan, namun setidaknya masyarakat dan berbagai pihak yang berkepentingan

(*stakeholders*) dapat memperoleh gambaran kinerja yang telah dilakukan oleh BNN Kabupaten Nganjuk sepanjang tahun 2024. Capaian kinerja BNN Kabupaten Nganjuk tahun 2023 telah dilakukan dengan berbagai upaya yang optimal untuk mencapai target sebagaimana yang ditetapkan dalam Rencana Strategis BNN Kabupaten Nganjuk.

# LAMPIRAN

1. Perjanjian Kinerja Tahun 2024
2. Hasil Pengukuran Indeks Kemandirian Partisipasi (IKP) Tahun 2024
3. Hasil Penghitungan Indeks Ketahanan Diri Remaja Terhadap Penyalahgunaan Narkoba (Dektari) Tahun 2024
4. Hasil Penghitungan Indeks Ketahanan Keluarga terhadap Penyalahgunaan Narkoba (Dektara) Tahun 2024
5. Hasil pengukuran IKR, IKM dan presentase Peningkatan Kualitas Hidup TA 2024
6. IKPA 2024



**PERJANJIAN KINERJA  
BADAN NARKOTIKA NASIONAL KABUPATEN NGANJUK  
TAHUN 2024**

Dalam rangka manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini:

**Nama : LILIK DEWI INDARWATI, AMK, SH, MM**

**Jabatan : KEPALA BNN KABUPATEN NGANJUK**

selanjutnya disebut pihak pertama

**Nama : Drs. MOHAMAD ARIS PURNOMO**

**Jabatan : KEPALA BNN PROVINSI JAWA TIMUR**

selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Surabaya, 06 Maret 2024

Pihak Kedua,

**KEPALA BNN PROVINSI JAWA TIMUR**

Pihak Pertama,

**KEPALA BNN KABUPATEN NGANJUK**

**Drs. MOHAMAD ARIS PURNOMO**

**LILIK DEWI INDARWATI, AMK, SH, MM**

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024  
BADAN NARKOTIKA NASIONAL KABUPATEN NGANJUK**

<b>No</b>	<b>Sasaran Kegiatan</b>	<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Target</b>
1	2	3	4
1	Meningkatnya daya tangkal anak dan remaja terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika	Indeks Ketahanan Diri Remaja Terhadap Penyalahgunaan Narkoba	52.39 Indeks
2	Meningkatnya daya tangkal keluarga terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika	Indeks Ketahanan Keluarga Terhadap Penyalahgunaan Narkoba	87.143 Indeks
3	Meningkatnya kesadaran dan kepedulian masyarakat dalam penanganan P4GN	Indeks Kemandirian Partisipasi	3.67 Indeks
4	Meningkatnya upaya pemulihan penyalahguna dan/atau pecandu narkotika	Persentase penyalah guna dan/atau pecandu narkotika yang mengalami peningkatan kualitas hidup	68 %
5	Meningkatnya kapasitas tenaga teknis rehabilitasi	Jumlah petugas penyelenggara layanan IBM yang terlatih	10 Orang
6	Meningkatnya aksesibilitas dan kemampuan fasilitas layanan rehabilitasi narkotika	Jumlah lembaga rehabilitasi yang operasional	1 Lembaga
7	Meningkatnya aksesibilitas dan kemampuan fasilitas layanan rehabilitasi narkotika	Jumlah unit penyelenggara layanan rehabilitasi IBM yang operasional	2 Unit
8	Meningkatnya kualitas layanan rehabilitasi narkotika	Indeks Kepuasan Penerima Layanan Rehabilitasi Pada Fasilitas Rehabilitasi BNN	3.60 Indeks
9	Meningkatnya proses manajemen kinerja secara efektif dan efisien	Nilai Kinerja Anggaran	89 Indeks
10	Meningkatnya tata kelola administrasi keuangan yang sesuai prosedur	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)	100 Indeks

1. Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Edukasi	Rp.80.000.000
2. Kegiatan Penyelenggaraan Advokasi	Rp.106.000.000
3. Kegiatan Pemberdayaan Peran serta Masyarakat	Rp.211.695.000
4. Kegiatan Penguatan Lembaga Rehabilitasi Instansi Pemerintah	Rp.14.890.000
5. Kegiatan Penguatan Lembaga Rehabilitasi Komponen Masyarakat	Rp.142.284.000
6. Kegiatan Pascarehabilitasi Penyalah guna dan/atau Pecandu Narkoba	Rp.9.985.000
7. Kegiatan Pengawasan Tahanan dan Barang Bukti	Rp.39.250.000
8. Kegiatan Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan	Rp.58.920.000
9. Kegiatan Pengembangan Organisasi, Tatalaksana, dan Sumber Daya Manusia	Rp.11.440.000
10. Kegiatan Penyusunan dan Pengembangan Rencana Program dan Anggaran BNN	Rp.13.765.000
11. Kegiatan Penyelenggaraan Ketatausahaan, Rumah Tangga dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana	Rp.1.205.046.000
12. Kegiatan Penyelenggaraan Kehumasan dan Keprotokolan	Rp.10.000.000

Surabaya, 06 Maret 2024

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

**KEPALA BNN PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPALA BNN KABUPATEN NGANJUK**



**Drs. MOHAMAD ARIS PURNOMO**



**LILIK DEWI INDARWATI, AMK, SH, MM**



**BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA  
(NATIONAL NARCOTICS BOARD REPUBLIC OF INDONESIA)**

Jl. MT. Haryono No. 11 Cawang Jakarta Timur

Telepon : (62-21) 80871566, 80871567

Faksimili : (62-21) 80885225, 80871591, 80871592, 80871593

e-mail : info@bnn.go.id website : www.bnn.go.id

Nomor : B/4050/XII/DE/PM.00/2024/BNN  
Klasifikasi : Biasa  
Lampiran : -  
Perihal : Hasil Pengukuran Indeks Kemandirian  
Partisipasi (IKP) Tahun 2024

Jakarta, 11 Desember 2024

Kepada

Yth. **1. Para Kepala BNN Provinsi**  
**2. Para Kepala BNN Kabupaten/Kota**

di

tempat

1. Rujukan :

- a. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- b. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;
- c. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 5 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional;
- d. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota;
- e. Program Kerja Deputi Bidang Pemberdayaan Masyarakat BNN TA. 2024.

2. Sehubungan dengan rujukan tersebut di atas, bersama ini disampaikan kepada tersebut alamat, bahwa Badan Narkotika Nasional melalui Deputi Bidang Pemberdayaan Masyarakat telah melakukan pengukuran Indeks Kemandirian Partisipasi (IKP) tahun 2024 yang dilaksanakan pada Penggiat P4GN di seluruh BNNP dan BNNK.

3. Berdasarkan dengan butir dua, berikut ini disampaikan hasil IKP terlampir dengan masing-masing target lembaga dari BNNP dan BNNK yang dapat dijadikan sebagai rujukan dalam evaluasi dan perencanaan strategi Program Pemberdayaan Peran Serta Masyarakat di tahun selanjutnya.

/4. Demikian ....

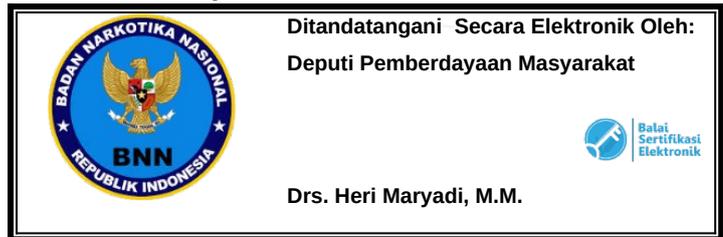
4. Demikian untuk menjadi maklum, atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.



Tembusan :

1. Kepala BNN;
2. Sekretaris Utama BNN;
3. Inspektur Utama BNN.

**a.n. Kepala Badan Narkotika Nasional**



**HASIL PENGUKURAN INDEKS KEMANDIRIAN PARTISIPASI (IKP) TAHUN 2024**

NO	SATKER	HASIL IKP				INDEKS	KATERGORI	MUTU
		PEMERINTAH	SWAST A	MASYARAKAT	PENDIDIKAN			
1	BNNP ACEH	3,32	0	3,29	0	3,31	Sangat Mandiri	A
2	BNNK SABANG	3,86	0	0	3,76	3,81	Sangat Mandiri	A
3	BNNK PIDIE JAYA	3,59	0	3,64	0	3,62	Sangat Mandiri	A
4	BNNK PIDIE	3,44	0	0	3,48	3,46	Sangat Mandiri	A
5	BNNK GAYO LUES	0	0	3,37	3,49	3,43	Sangat Mandiri	A
6	BNNK BIREUEN	3,27	0	0	3,37	3,32	Sangat Mandiri	A
7	BNNK BANDA ACEH	3,47	0	0	3,84	3,66	Sangat Mandiri	A
8	BNNK ACEH TAMIANG	3,72	0	0	3,67	3,70	Sangat Mandiri	A
9	BNNK ACEH SELATAN	3,33	0	3,28	0	3,31	Sangat Mandiri	A
10	BNN KOTA LHOKSEUMAWE	3,84	0	3,68	0	3,76	Sangat Mandiri	A
11	BNN KOTA LANGSA	3,67	0	3,78	0	3,73	Sangat Mandiri	A
12	BNNP SUMATERA BARAT	0	0	3,69	3,76	3,73	Sangat Mandiri	A
13	BNNK SOLOK	0	0	3,77	3,8	3,79	Sangat Mandiri	A
14	BNNK SAWAHLUNTO	3,6	0	0	3,86	3,73	Sangat Mandiri	A
15	BNNK PAYAKUMBUH	0	0	3,83	3,86	3,85	Sangat Mandiri	A
16	BNNK PASAMAN BARAT	0	0	3,81	3,86	3,84	Sangat Mandiri	A
17	BNNP SUMUT	0	0	3,53	3,6	3,57	Sangat Mandiri	A

LAMPIRAN  
 SURAT KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL  
 NOMOR : B/4050/XII/DE/PM.00/2024/BNN  
 TANGGAL : 11 Desember 2024

NO	SATKER	HASIL IKP				INDEKS	KATERGORI	MUTU
		PEMERINTAH	SWAST A	MASYARAKAT	PENDIDIKAN			
18	BNNK TEBING TINGGI	0	0	3,383	3,451	3,42	Sangat Mandiri	A
19	BNNK TAPANULI SELATAN	3,79	3,67	0	0	3,73	Sangat Mandiri	A
20	BNNK TJ. BALAI	0	0	3,4	3,73	3,57	Sangat Mandiri	A
21	BNNK SIMALUNGUN	0	3,48	0	3,54	3,51	Sangat Mandiri	A
22	BNNK SERDANG BEDAGAI	0	0	3,45	3,17	3,31	Sangat Mandiri	A
23	BNNK PEMATANG SIANTAR	3,428	0	0	3,434	3,43	Sangat Mandiri	A
24	BNNK LANGKAT	0	0	3,47	3,55	3,51	Sangat Mandiri	A
25	BNNK MANDAILING NATAL	0	0	3,5	3,55	3,53	Sangat Mandiri	A
26	BNNK LABUHAN BATU UTARA	3,4368	0	0	3,6224	3,53	Sangat Mandiri	A
27	BNNK KARO	0	0	3,32	3,708	3,51	Sangat Mandiri	A
28	BNNK GUNUNGSITOLI	0	0	3,46	3,53	3,50	Sangat Mandiri	A
29	BNNK DELI SERDANG	3,76	0	0	3,7	3,73	Sangat Mandiri	A
30	BNNK BINJAI	0	0	3,68	3,53	3,61	Sangat Mandiri	A
31	BNNK BATUBARA	3,84	0	0	3,8	3,82	Sangat Mandiri	A
32	BNNK ASAHAN	0	0	3,41	3,43	3,42	Sangat Mandiri	A
33	BNNP SUMSEL	4	0	0	4	4,00	Sangat Mandiri	A
34	BNNK PRABUMULIH	3,92	0	0	3,88	3,90	Sangat Mandiri	A
35	BNNK PAGAR ALAM	0	0	3,54	3,53	3,54	Sangat Mandiri	A
36	BNNK OKU TIMUR	3,73	0	0	3,61	3,67	Sangat Mandiri	A
37	BNNK OGAN KOMERING ILIR	3,88	0	0	3,51	3,70	Sangat Mandiri	A

NO	SATKER	HASIL IKP				INDEKS	KATERGORI	MUTU
		PEMERINTAH	SWAST A	MASYARAKAT	PENDIDIKAN			
38	BNNK OGAN ILIR	3,44	0	0	3,48	3,46	Sangat Mandiri	A
39	BNNK MUARA ENIM	3,68	0	0	3,67	3,68	Sangat Mandiri	A
40	BNNK LUBUKLINGGAU	0	0	3,73	3,86	3,80	Sangat Mandiri	A
41	BNNK EMPAT LAWANG	3,75	0	0	3,53	3,64	Sangat Mandiri	A
42	BNN KAB MUSI RAWAS	0	0	3,48	3,36	3,42	Sangat Mandiri	A
43	BNNP LAMPUNG	3,32	0	0	3,56	3,44	Sangat Mandiri	A
44	BNNK WAY KANAN	3,56	0	0	3,54	3,55	Sangat Mandiri	A
45	BNNK TANGGAMUS	3,54	0	0	3,94	3,74	Sangat Mandiri	A
46	BNNK LAMPUNG TIMUR	3,25	0	3,47	0	3,36	Sangat Mandiri	A
47	BNNK LAMPUNG SELATAN	3,6	0	3,56	0	3,58	Sangat Mandiri	A
48	BNN KOTA METRO	3,62	0	0	3,53	3,58	Sangat Mandiri	A
49	BNNP RIAU	3,7	0	0	3,67	3,69	Sangat Mandiri	A
50	BNNK PELALAWAN	3,66	0	0	3,76	3,71	Sangat Mandiri	A
51	BNNK PEKAN BARU	3,9	0	0	3,8	3,85	Sangat Mandiri	A
52	BNNK KUANTAN SINGINGI	0	0	3,8	3,92	3,86	Sangat Mandiri	A
53	BNN KOTA DUMAI	4	0	0	4	4,00	Sangat Mandiri	A
54	BNNP KEP. RIAU	0	4	0	4	4,00	Sangat Mandiri	A
55	BNNK TANJUNGPINANG	0	0	3,68	3,778	3,73	Sangat Mandiri	A
56	BNNK KARIMUN	0	0	3,96	3,84	3,90	Sangat Mandiri	A
57	BNN KOTA BATAM	0	0	3,94	3,95	3,95	Sangat Mandiri	A
58	BNNP JAMBI	3,616	3,765	0	0	3,69	Sangat Mandiri	A

NO	SATKER	HASIL IKP				INDEKS	KATERGORI	MUTU
		PEMERINTAH	SWAST A	MASYARAKAT	PENDIDIKAN			
59	BNNK TANJAB TIMUR	3,88	0	0	4	3,71	Sangat Mandiri	A
60	BNN KOTA JAMBI	3,93	0	0	3,85	3,89	Sangat Mandiri	A
61	BNNK BATANGHARI	3,62	0	0	3,58	3,60	Sangat Mandiri	A
62	BNNP BABEL	3,381	0	0	3,397	3,39	Sangat Mandiri	A
63	BNNK PANGKALPINANG	0	0	3,7	3,5	3,60	Sangat Mandiri	A
64	BNNK BELITUNG	3,55	0	0	3,2	3,38	Sangat Mandiri	A
65	BNNK BANGKA SELATAN	0	0	3,96	3,96	3,96	Sangat Mandiri	A
66	BNNK BANGKA	3,62	0	3,7	0	3,66	Sangat Mandiri	A
67	BNNP BENGKULU	3,59	0	0	3,73	3,66	Sangat Mandiri	A
68	BNNK BENGKULU SELATAN	3,8	0	0	3,5	3,65	Sangat Mandiri	A
69	BNNK BENGKULU	0	0	3,69	3,49	3,59	Sangat Mandiri	A
70	BNNP DKI JAKARTA	3,05	0	0	3,52	3,29	Sangat Mandiri	A
71	BNNK JAKARTA SELATAN	3,24	0	2,81	0	3,03	Mandiri	B
72	BNN KOTA JAKARTA UTARA	0	0	3,57	3,52	3,55	Sangat Mandiri	A
73	BNN KOTA JAKARTA TIMUR	3,55	0	0	3,67	3,61	Sangat Mandiri	A
74	BNNP BANTEN	3,54	0	3,57	0	3,56	Sangat Mandiri	A
75	BNN KOTA TANGERANG SELATAN	0	0	3,74	3,36	3,55	Sangat Mandiri	A
76	BNN KOTA TANGERANG	0	0	3,39	3,32	3,36	Sangat Mandiri	A
77	BNN KOTA CILEGON	3,67	0	3,63	0	3,65	Sangat Mandiri	A
78	BNNP JAWA BARAT	0	3,52	0	3,54	3,53	Sangat Mandiri	A

NO	SATKER	HASIL IKP				INDEKS	KATERGORI	MUTU
		PEMERINTAH	SWAST A	MASYARAKAT	PENDIDIKAN			
79	BNNK SUMEDANG	3,75	3,67	0	0	3,71	Sangat Mandiri	A
80	BNNK SUKABUMI	3,83	0	0	3,83	3,83	Sangat Mandiri	A
81	BNNK KARAWANG	3,8	0	0	3,4	3,60	Sangat Mandiri	A
82	BNNK GARUT	0	3,78	0	3,78	3,78	Sangat Mandiri	A
83	BNNK CIMAH	3,65	0	0	3,45	3,55	Sangat Mandiri	A
84	BNNK CIANJUR	3,52	0	0	3,5	3,51	Sangat Mandiri	A
85	BNNK CIAMIS	3,6	0	0	3,57	3,59	Sangat Mandiri	A
86	BNNK BANDUNG BARAT	3,65	0	3,87	0	3,76	Sangat Mandiri	A
87	BNN KOTA TASIKMALAYA	3,56	0	3,8	0	3,68	Sangat Mandiri	A
88	BNN KOTA DEPOK	0	0	3,58	3,66	3,62	Sangat Mandiri	A
89	BNN KOTA CIREBON	3,88	0	0	3,93	3,91	Sangat Mandiri	A
90	BNN KOTA BANDUNG	3,8	0	0	3,43	3,80	Sangat Mandiri	A
91	BNN KABUPATEN BOGOR	3,4	0	0	3,59	3,50	Sangat Mandiri	A
92	BNNK KUNINGAN	3,345	0	0	3,32	3,33	Sangat Mandiri	A
93	BNNP JAWA TENGAH	3,78	0	3,46	0	3,62	Sangat Mandiri	A
94	BNNK TEMANGGUNG	0	0	4	4	4,00	Sangat Mandiri	A
95	BNNK TEGAL	0	3,36	0	3,36	3,36	Sangat Mandiri	A
96	BNNK PURBALINGGA	3,4	0	0	3,41	3,41	Sangat Mandiri	A
97	BNNK MAGELANG	0	0	3,72	3,64	3,68	Sangat Mandiri	A
98	BNNK CILACAP	0	3,52	0	3,48	3,50	Sangat Mandiri	A
99	BNNK BATANG	3,46	0	3,4	0	3,43	Sangat Mandiri	A

NO	SATKER	HASIL IKP				INDEKS	KATERGORI	MUTU
		PEMERINTAH	SWAST A	MASYARAKAT	PENDIDIKAN			
10 0	BNNK BANYUMAS	0	0	3,64	3,61	3,63	Sangat Mandiri	A
10 1	BNN KOTA SURAKARTA	3,42	0	0	3,52	3,47	Sangat Mandiri	A
10 2	BNN KAB. KENDAL	3,71	0	0	3,84	3,78	Sangat Mandiri	A
10 3	BNNP JAWA TIMUR	3,69	0	0	3,62	3,66	Sangat Mandiri	A
10 4	BNNK TULUNG AGUNG	3,73	0	0	4	3,87	Sangat Mandiri	A
10 5	BNNK TUBAN	3,55	0	3,71	0	3,63	Sangat Mandiri	A
10 6	BNNK TRENGGALEK	3,6	0	0	3,5	3,55	Sangat Mandiri	A
10 7	BNNK SUMENEP	0	0	3,68	2,96	3,32	Sangat Mandiri	A
10 8	BNNK SIDOARJO	0	0	3,84	3,76	3,80	Sangat Mandiri	A
10 9	BNNK PASURUAN	0	0	3,88	3,76	3,82	Sangat Mandiri	A
11 0	BNNK NGANJUK	3,54	0	3,88	0	3,71	Sangat Mandiri	A
11 1	BNNK MOJOKERTO	3,29	0	3,34	0	3,32	Sangat Mandiri	A
11 2	BNN KAB MALANG	3,72	0	0	3,72	3,72	Sangat Mandiri	A
11 3	BNNK LUMAJANG	3,56	0	0	3,56	3,56	Sangat Mandiri	A

NO	SATKER	HASIL IKP				INDEKS	KATERGORI	MUTU
		PEMERINTAH	SWAST A	MASYARAKAT	PENDIDIKAN			
11 4	BNNKAB KEDIRI	0	0	3,84	3,2	3,52	Sangat Mandiri	A
11 5	BNNK GRESIK	4	0	3,92	0	3,96	Sangat Mandiri	A
11 6	BNNK BLITAR	3,47	0	0	3,344	3,41	Sangat Mandiri	A
11 7	BNN KOTA SURABAYA	0	0	3,76	3,76	3,76	Sangat Mandiri	A
11 8	BNN KOTA MALANG	0	0	3,26	3,78	3,52	Sangat Mandiri	A
11 9	BNN KOTA KEDIRI	3,84	0	3,8	0	3,82	Sangat Mandiri	A
12 0	BNN KOTA BATU	3,52	0	0	3,72	3,62	Sangat Mandiri	A
12 1	BNNP D.I. YOGYAKARTA	3,66	0	3,59	0	3,63	Sangat Mandiri	A
12 2	BNNK SLEMAN	0	0	3,46	3,53	3,50	Sangat Mandiri	A
12 3	BNNK BANTUL	0	0	3,71	3,76	3,74	Sangat Mandiri	A
12 4	BNN KOTA YOGYAKARTA	0	0	3,69	3,56	3,63	Sangat Mandiri	A
12 5	BNNP BALI	0	3,79	0	3,55	3,67	Sangat Mandiri	A
12 6	BNNK KLUNGKUNG	3,47	0	3,96	0	3,72	Sangat Mandiri	A
12 7	BNNK KARANGASEM	3,48	0	3,32	0	3,40	Sangat Mandiri	A

NO	SATKER	HASIL IKP				INDEKS	KATERGORI	MUTU
		PEMERINTAH	SWAST A	MASYARAKAT	PENDIDIKAN			
12 8	BNNK GIANYAR	3,96	3,88	0	0	3,92	Sangat Mandiri	A
12 9	BNN KOTA DENPASAR	0	0	3,3	3,3	3,30	Sangat Mandiri	A
13 0	BNN KABUPATEN BADUNG	3,93	3,87	0	0	3,90	Sangat Mandiri	A
13 1	BNN KAB BULELENG	3,35	0	3,64	0	3,50	Sangat Mandiri	A
13 2	BNNP NTB	0	0	3,4	3,3	3,35	Sangat Mandiri	A
13 3	BNNK SUMBAWA BARAT	0	0	3,57	3,52	3,55	Sangat Mandiri	A
13 4	BNNK SUMBAWA	3,33	0	3,74	0	3,54	Sangat Mandiri	A
13 5	BNNK MATARAM	3,92	0	0	3,84	3,88	Sangat Mandiri	A
13 6	BNNK BIMA	3,74	0	3,8	0	3,77	Sangat Mandiri	A
13 7	BNNP NTT	3,47	0	0	3,48	3,48	Sangat Mandiri	A
13 8	BNNK KOTA KUPANG	3,69	0	0	3,39	3,54	Sangat Mandiri	A
13 9	BNNK BELU	0	0	3,62	3,36	3,49	Sangat Mandiri	A
14 0	BNN KAB. ROTE NDAO	0	0	3,34	3,37	3,36	Sangat Mandiri	A
14 1	BNNP KALIMANTAN BARAT	3,43	0	0	3,42	3,43	Sangat Mandiri	A

NO	SATKER	HASIL IKP				INDEKS	KATERGORI	MUTU
		PEMERINTAH	SWAST A	MASYARAKAT	PENDIDIKAN			
14 2	BNNK SINTANG	3,06	0	0	3,4	3,23	Mandiri	B
14 3	BNNK SANGGAU	3,86	0	0	4,05	3,96	Sangat Mandiri	A
14 4	BNNK PONTIANAK	0	0	3,86	3,64	3,75	Sangat Mandiri	A
14 5	BNNK MEMPAWAH	0	0	3,36	3,382	3,37	Sangat Mandiri	A
14 6	BNN KOTA SINGKAWANG	0	0	3,6	3,54	3,57	Sangat Mandiri	A
14 7	BNN KAB. KUBU RAYA	0	0	3,43	3,46	3,45	Sangat Mandiri	A
14 8	BNN KAB BENGKAYANG	0	0	3,45	3,73	3,59	Sangat Mandiri	A
14 9	BNNP KALIMANTAN SELATAN	3,4	0	3,2	0	3,30	Sangat Mandiri	A
15 0	BNNK TANAH LAUT	3,45	0	0	3,38	3,42	Sangat Mandiri	A
15 1	BNNK TABALONG	0	0	3,71	3,04	3,38	Sangat Mandiri	A
15 2	BNNK HULU SUNGAI UTARA	0	0	3,36	3,28	3,32	Sangat Mandiri	A
15 3	BNNK HULU SUNGAI SELATAN	0	0	3,68	3,64	3,66	Sangat Mandiri	A
15 4	BNNK BARITO KUALA	2,75	0	3,29	0	3,02	Mandiri	B
15 5	BNNK BANJARMASIN	3,62	0	0	3,78	3,70	Sangat Mandiri	A

NO	SATKER	HASIL IKP				INDEKS	KATERGORI	MUTU
		PEMERINTAH	SWAST A	MASYARAKAT	PENDIDIKAN			
15 6	BNNK BANJARBARU	0	0	3,55	3,92	3,74	Sangat Mandiri	A
15 7	BNNK BALANGAN	0	0	3,33	3,4	3,37	Sangat Mandiri	A
15 8	BNNP KALIMANTAN TENGAH	3,52	0	0	3,6	3,56	Sangat Mandiri	A
15 9	BNNK PALANGKA RAYA	0	0	3,56	3,52	3,54	Sangat Mandiri	A
16 0	BNNK KOTAWARINGIN BARAT	0	0	4	3,88	3,94	Sangat Mandiri	A
16 1	BNNP KALIMANTAN TIMUR	3,7	0	3,68	0	3,69	Sangat Mandiri	A
16 2	BNNK SAMARINDA	3,75	0	3,62	0	3,69	Sangat Mandiri	A
16 3	BNNK BALIKPAPAN	3,64	0	3,76	0	3,70	Sangat Mandiri	A
16 4	BNN KOTA BONTANG	3,48	3,82	0	0	3,65	Sangat Mandiri	A
16 5	BNNP KALIMANTAN UTARA	0	0	3,56	3,57	3,57	Sangat Mandiri	A
16 6	BNNK TARAKAN	3,22	3,42	0	0	3,32	Sangat Mandiri	A
16 7	BNNK NUNUKAN	3,34	0	3,29	0	3,32	Sangat Mandiri	A
16 8	BNNP SULAWESI BARAT	3,24	0	0	3,47	3,36	Sangat Mandiri	A
16 9	BNNK POLEWALI MANDAR	3,6	0	0	3,6	3,60	Sangat Mandiri	A

NO	SATKER	HASIL IKP				INDEKS	KATERGORI	MUTU
		PEMERINTAH	SWAST A	MASYARAKAT	PENDIDIKAN			
17 0	BNNP SULAWESI TENGGERA	3,38	0	0	3,59	3,49	Sangat Mandiri	A
17 1	BNNK KOLAKA	3,79	0	0	3,98	3,89	Sangat Mandiri	A
17 2	BNNK BAU BAU	3,85	0	0	3,96	3,91	Sangat Mandiri	A
17 3	BNN KOTA KENDARI	0	0	3,45	3,99	3,72	Sangat Mandiri	A
17 4	BNNK MUNA	0	0	3,69	3,7	3,70	Sangat Mandiri	A
17 5	BNNP SULAWESI SELATAN	3,62	3,25	0	0	3,44	Sangat Mandiri	A
17 6	BNN KOTA PALOPO	0	0	3,36	3,87	3,62	Sangat Mandiri	A
17 7	BNNK TANA TORAJA	0	0	3,89	3,92	3,91	Sangat Mandiri	A
17 8	BNNK BONE	3,88	0	0	3,17	3,53	Sangat Mandiri	A
17 9	BNNP SULAWESI TENGAH	3,65	0	0	2,99	3,32	Sangat Mandiri	A
18 0	BNNK PALU	3,68	0	3,72	0	3,70	Sangat Mandiri	A
18 1	BNNK DONGGALA	3,84	0	0	4	3,92	Sangat Mandiri	A
18 2	BNNK BANGGAI KEP	0	0	3,82	3,53	3,68	Sangat Mandiri	A
18 3	BNN KAB TOJO UNA-UNA	3,4	0	0	3,41	3,41	Sangat Mandiri	A

NO	SATKER	HASIL IKP				INDEKS	KATERGORI	MUTU
		PEMERINTAH	SWAST A	MASYARAKAT	PENDIDIKAN			
18 4	BNN KAB POSO	3,27	0	0	3,76	3,52	Sangat Mandiri	A
18 5	BNN KAB MOROWALI	3,41	0	0	3,55	3,48	Sangat Mandiri	A
18 6	BNNP SULAWESI UTARA	2,93	0	0	3,07	3,00	Mandiri	B
18 7	BNNK BOLAANG MONGONDOW	3,68	0	3,12	0	3,40	Sangat Mandiri	A
18 8	BNN KOTA BITUNG	0	0	3	3,44	3,22	Mandiri	B
18 9	BNN KOTA MANADO	3,68	0	0	3,12	3,40	Sangat Mandiri	A
19 0	BNNK KEPULAUAN SANGIHE	3,42	0	0	3,4	3,41	Sangat Mandiri	A
19 1	BNNP GORONTALO	3,27	0	0	3,85	3,56	Sangat Mandiri	A
19 2	BNN KOTA GORONTALO	3,41	0	0	3,81	3,61	Sangat Mandiri	A
19 3	BNNK BONE BOLANGO	3,74	0	3,45	0	3,60	Sangat Mandiri	A
19 4	BNN KAB GORONTALO	3,75	0	3,76	0	3,76	Sangat Mandiri	A
19 5	BNNK GORONTALO UTARA	3,54	0	3,57	0	3,56	Sangat Mandiri	A
19 6	BNNK BOALEMO	3,44	0	0	3,54	3,49	Sangat Mandiri	A
19 7	BNNP MALUKU	3,12	0	3,08	0	3,10	Mandiri	B

NO	SATKER	HASIL IKP				INDEKS	KATERGORI	MUTU
		PEMERINTAH	SWAST A	MASYARAKAT	PENDIDIKAN			
19 8	BNNK TUAL	3,51	0	0	3,21	3,36	Sangat Mandiri	A
19 9	BNNK BURU SELATAN	3,53	0	0	3,25	3,39	Sangat Mandiri	A
20 0	BNNP MALUKU UTARA	0	0	3,69	3,57	3,63	Sangat Mandiri	A
20 1	BNNK PULAU MOROTAI	0	0	3,8	3,04	3,42	Sangat Mandiri	A
20 2	BNNK HALMAHERA UTARA	3,92	0	3,84	0	3,88	Sangat Mandiri	A
20 3	BNN KOTA TIDORE KEPULAUAN	3,52	0	0	3,2	3,36	Sangat Mandiri	A
20 4	BNNP PAPUA	3,29	0	3,3	0	3,30	Sangat Mandiri	A
20 5	BNNK MIMIKA	3,35	0	0	3,25	3,30	Sangat Mandiri	A
20 6	BNNK JAYAPURA	0	0	3,31	3,31	3,31	Sangat Mandiri	A
20 7	BNNP PAPUA BARAT	3,48	0	0	3,45	3,47	Sangat Mandiri	A
<b>TOTAL</b>						<b>3,59</b>	<b>Sangat Mandiri</b>	<b>A</b>

LAMPIRAN  
SURAT KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL  
NOMOR : B/4050/XII/DE/PM.00/2024/BNN  
TANGGAL : 11 Desember 2024

**a.n. Kepala Badan Narkotika Nasional**



	<b>Ditandatangani Secara Elektronik Oleh:</b> <b>Deputi Pemberdayaan Masyarakat</b>
	<b>Drs. Heri Maryadi, M.M.</b>

 Balai Sertifikasi Elektronik



**BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA  
(NATIONAL NARCOTICS BOARD REPUBLIC OF INDONESIA)**

Jl. MT. Haryono No. 11 Cawang Jakarta Timur

Telepon : (62-21) 80871566, 80871567

Faksimili : (62-21) 80885225, 80871591, 80871592, 80871593

e-mail : info@bnn.go.id website : www.bnn.go.id

Nomor : B/4224/XII/DE/PC.00/2024/BNN  
Klasifikasi : Biasa  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Perihal : Hasil Penghitungan Indeks  
Ketahanan Diri Remaja Terhadap  
Penyalahgunaan Narkoba (Dektari)  
Tahun 2024

Jakarta, 24 Desember 2024

Kepada

Yth. **1. Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi**  
**2. Kepala Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota**

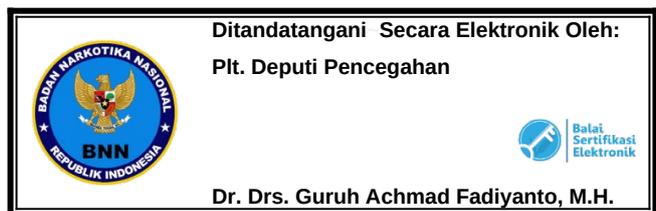
di  
Tempat

1. Rujukan :

- a. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- b. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;
- c. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 5 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional;
- d. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota;
- e. Surat Edaran Nomor : SE/127/IX/DE/PC.00/2020/BNN tanggal 30 September 2020 tentang Penghitungan Indeks Ketahanan Diri Remaja Melalui Aplikasi Dektari;
- f. Surat Plt. Deputi Pencegahan Nomor : B/3653/XI/DE/PC.00/2024/BNN tanggal 12 November 2024 perihal Pengisian Evaluasi Kegiatan di Aplikasi Dektari;
- g. Perjanjian kinerja Direktur Informasi dan Edukasi tahun 2024.

2. Sehubungan dengan rujukan tersebut di atas, diinformasikan kepada Kepala BNN Provinsi dan BNN Kab./Kota hasil penghitungan Indeks Ketahanan Diri Remaja terhadap Penyalahgunaan Narkoba (Dektari) yang merupakan pencapaian Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Direktorat Informasi dan Edukasi. Sesuai Peraturan Kepala BNN Nomor 6 tahun 22020 tentang Rencana Strategis Badan Narkotika Nasional Tahun 2020 – 2024, dengan hasil sebagai berikut ;
- Penghitungan Dektari menggunakan aplikasi mobile Dektari Aja terhadap remaja usia 12 – 21 tahun (pelajar atau mahasiswa) yang telah menerima penyuluhan/sosialisasi oleh BNN Provinsi dan BNN Kab./Kota;
  - Hasil angka penghitungan Dektari Tahun 2024 adalah **52,04 (Tinggi)** Dengan target **53,51 (Tinggi)**, dengan klasifikasi hasil capaian wilayah :
    - Kategori Sangat Tinggi ( $\geq 53,71$ ) sebanyak 104 Satker
    - Kategori Tinggi (49,74 – 53,50) sebanyak 54 Satker
    - Kategori Rendah (45,98 – 49,73) sebanyak 23 Satker
    - Kategori Sangat Rendah ( $\leq 45,97$ ) sebanyak 26 Satker
  - Hasil penghitungan terlampir.
3. Demikian untuk menjadi maklum, atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.

a.n. Kepala Badan Narkotika Nasional



Tembusan :

1. Kepala BNN;
2. Sekretaris Utama BNN;
3. Inspektur Utama BNN.

REKAPITULASI PENGHITUNGAN INDEKS KETAHANAN DIRI REMAJA  
TERHADAP PENYALAHGUNAAN NARKOBA (DEKTARI) TAHUN 2024

NO	NAMA BNNP/BNNK	NILAI DEKTARI	KATEGORI
	<b>BNN PUSAT</b>		
<b>1</b>	<b>BNNP NANGGROE ACEH DARUSSALAM</b>	52.23	TINGGI
1	BNN KABUPATEN ACEH SELATAN	51.92	TINGGI
2	BNN KABUPATEN GAYO LUES	49.60	RENDAH
3	BNN KABUPATEN PIDIE JAYA	52.04	TINGGI
4	BNN KOTA SABANG	55.47	SANGAT TINGGI
5	BNN KOTA LHOKSEUMAWE	50.47	TINGGI
6	BNN KOTA LANGSA	47.27	RENDAH
7	BNN KABUPATEN BIREUEN	48.96	RENDAH
8	BNN KABUPATEN ACEH TAMIANG	38.79	SANGAT RENDAH
9	BNN KABUPATEN PIDIE	51.75	Tinggi
10	BNN KOTA BANDA ACEH	55.66	SANGAT TINGGI
<b>RATA-RATA PROVINSI ACEH</b>		<b>50,38</b>	<b>TINGGI</b>
<b>2</b>	<b>BNNP SUMATERA UTARA</b>	54.82	SANGAT TINGGI
11	BNN KABUPATEN KARO	55.16	SANGAT TINGGI
12	BNN KOTA BINJAI	55.72	SANGAT TINGGI
13	BNN KOTA TANJUNG BALAI	51.91	TINGGI
14	BNN KOTA GUNUNGSITOLI	53.42	TINGGI
15	BNN KABUPATEN DELI SERDANG	42.08	SANGAT RENDAH
16	BNN KOTA PEMATANG SIANTAR	45.42	SANGAT RENDAH
17	BNN KABUPATEN LANGKAT	49.89	TINGGI
18	BNN KABUPATEN ASAHAN	52.48	TINGGI
19	BNN KABUPATEN MANDAILING NATAL	36.12	SANGAT RENDAH
20	BNN KABUPATEN TAPANULI SELATAN	55.33	SANGAT TINGGI
21	BNN KABUPATEN SERDANG BEDAGAI	50.11	TINGGI
22	BNN KOTA TEBING TINGGI	48.20	RENDAH
23	BNN KABUPATEN SIMALUNGUN	54.69	SANGAT TINGGI
24	BNN KABUPATEN LABUHANBATU UTARA	52.12	TINGGI
25	BNN KABUPATEN BATU BARA	56.15	SANGAT TINGGI

REKAPITULASI PENGHITUNGAN INDEKS KETAHANAN DIRI REMAJA  
TERHADAP PENYALAHGUNAAN NARKOBA (DEKTARI) TAHUN 2024

NO	NAMA BNNP/BNNK	NILAI DEKTARI	KATEGORI
<b>RATA-RATA SUMATERA UTARA</b>		<b>50.85</b>	<b>TINGGI</b>
<b>3</b>	<b>BNNP SUMATERA BARAT</b>	55.80	SANGAT TINGGI
26	BNN KOTA SAWAHLUNTO	52.35	TINGGI
27	BNN KOTA PAYAKUMBUH	55.36	SANGAT TINGGI
28	BNN KABUPATEN SOLOK	53.36	TINGGI
29	BNN KABUPATEN PASAMAN BARAT	49.33	RENDAH
<b>RATA-RATA PROVINSI SUMATERA BARAT</b>		<b>53.24</b>	<b>TINGGI</b>
<b>4</b>	<b>BNNP RIAU</b>	53.28	TINGGI
30	BNN KABUPATEN KUANTAN SINGINGI	55.26	SANGAT TINGGI
31	BNN KABUPATEN PELALAWAN	54.26	SANGAT TINGGI
32	BNN KOTA PEKANBARU	50.28	TINGGI
33	BNN KOTA DUMAI	49.67	RENDAH
<b>RATA-RATA PROVINSI RIAU</b>		<b>52.55</b>	<b>TINGGI</b>
<b>5</b>	<b>BNNP JAMBI</b>	38.53	SANGAT RENDAH
34	BNN KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR	53.28	TINGGI
35	BNN KOTA JAMBI	53.65	SANGAT TINGGI
36	BNN KABUPATEN BATANGHARI	43.60	SANGAT RENDAH
<b>RATA-RATA PROVINSI JAMBI</b>		<b>47.26</b>	<b>RENDAH</b>
<b>6</b>	<b>BNNP SUMATERA SELATAN</b>	54.23	SANGAT TINGGI
37	BNN KABUPATEN OGAN ILIR	52.98	TINGGI
38	BNN KOTA PAGARALAM	55.93	SANGAT TINGGI
39	BNN KOTA LUBUKLINGGAU	41.66	SANGAT RENDAH
40	BNN KABUPATEN EMPAT LAWANG	49.38	RENDAH
41	BNN KOTA PRABUMULIH	54.73	SANGAT TINGGI
42	BNN KABUPATEN MUARA ENIM	54.98	SANGAT TINGGI
43	BNN KABUPATEN MUSI RAWAS	49.09	RENDAH
44	BNN KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR	49.41	RENDAH
45	BNN KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR	55.87	SANGAT TINGGI
<b>RATA-RATA PROVINSI SUMATERA SELATAN</b>		<b>51.83</b>	<b>TINGGI</b>
<b>7</b>	<b>BNNP LAMPUNG</b>	52.30	TINGGI
46	BNN KABUPATEN TANGGAMUS	55.60	SANGAT TINGGI
47	BNN KABUPATEN LAMPUNG SELATAN	55.50	SANGAT TINGGI
48	BNN KOTA METRO	39.97	SANGAT RENDAH
49	BNN KABUPATEN LAMPUNG TIMUR	47.28	RENDAH
50	BNN KABUPATEN WAY KANAN	45.42	SANGAT RENDAH
<b>RATA-RATA PROVINSI LAMPUNG</b>		<b>49.35</b>	<b>RENDAH</b>
<b>8</b>	<b>BNNP KEPULAUAN BANGKA BELITUNG</b>	55.73	SANGAT TINGGI
51	BNN KABUPATEN BANGKA	53.15	TINGGI
52	BNN KOTA PANGKAL PINANG	55.65	SANGAT TINGGI

REKAPITULASI PENGHITUNGAN INDEKS KETAHANAN DIRI REMAJA  
TERHADAP PENYALAHGUNAAN NARKOBA (DEKTARI) TAHUN 2024

NO	NAMA BNNP/BNNK	NILAI DEKTARI	KATEGORI
53	BNN KABUPATEN BELITUNG	51.69	TINGGI
54	BNN KABUPATEN BANGKA SELATAN	55.94	SANGAT TINGGI
<b>RATA-RATA PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG</b>		<b>54.43</b>	<b>SANGAT TINGGI</b>
<b>9</b>	<b>BNNP KEPULAUAN RIAU</b>	54.39	SANGAT TINGGI
55	BNN KABUPATEN KARIMUN	55.84	SANGAT TINGGI
56	BNN KOTA BATAM	54.35	SANGAT TINGGI
57	BNN KOTA TANJUNG PINANG	55.84	SANGAT TINGGI
<b>RATA-RATA PROVINSI KEPULAUAN RIAU</b>		<b>55.11</b>	<b>SANGAT TINGGI</b>
<b>10</b>	<b>BNNP BENGKULU</b>	54.88	SANGAT TINGGI
58	BNN KOTA BENGKULU	52.16	TINGGI
59	BNN KABUPATEN BENGKULU SELATAN	49.61	RENDAH
<b>RATA-RATA PROVINSI BENGKULU</b>		<b>52.22</b>	<b>TINGGI</b>
<b>11</b>	<b>BNNP DKI JAKARTA</b>	55.70	SANGAT TINGGI
60	BNN KOTA JAKARTA SELATAN	55.64	SANGAT TINGGI
61	BNN KOTA JAKARTA TIMUR	43.20	SANGAT RENDAH
62	BNN KOTA JAKARTA UTARA	43.71	SANGAT RENDAH
<b>RATA-RATA PROVINSI DKI JAKARTA</b>		<b>49.56</b>	<b>RENDAH</b>
<b>12</b>	<b>BNNP BANTEN</b>	43.44	SANGAT RENDAH
63	BNN KOTA TANGERANG SELATAN	54.58	SANGAT TINGGI
64	BNN KOTA CILEGON	56.85	SANGAT TINGGI
65	BNN KOTA TANGERANG	55.80	SANGAT TINGGI
<b>RATA-RATA PROVINSI BANTEN</b>		<b>52.67</b>	<b>TINGGI</b>
<b>13</b>	<b>BNNP DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA</b>	55.51	SANGAT TINGGI
66	BNN KABUPATEN SLEMAN	52.04	TINGGI
67	BNN KABUPATEN BANTUL	49.75	TINGGI
68	BNN KOTA YOGYAKARTA	55.86	SANGAT TINGGI
<b>RATA-RATA PROVINSI DI YOGYAKARTA</b>		<b>53.29</b>	<b>TINGGI</b>
<b>14</b>	<b>BNNP JAWA BARAT</b>	47.36	RENDAH
69	BNN KABUPATEN BOGOR	55.52	SANGAT TINGGI
70	BNN KABUPATEN CIANJUR	55.25	SANGAT TINGGI
71	BNN KOTA BANDUNG	56.40	SANGAT TINGGI
72	BNN KOTA CIREBON	55.91	SANGAT TINGGI
73	BNN KOTA CIMAH	53.62	SANGAT TINGGI
74	BNN KABUPATEN SUKABUMI	55.72	SANGAT TINGGI
75	BNN KABUPATEN GARUT	55.72	SANGAT TINGGI
76	BNN KABUPATEN KUNINGAN	56.18	SANGAT TINGGI
77	BNN KABUPATEN CIAMIS	55.01	SANGAT TINGGI
78	BNN KOTA DEPOK	54.87	SANGAT TINGGI
79	BNN KABUPATEN KARAWANG	48.59	RENDAH

REKAPITULASI PENGHITUNGAN INDEKS KETAHANAN DIRI REMAJA  
TERHADAP PENYALAHGUNAAN NARKOBA (DEKTARI) TAHUN 2024

NO	NAMA BNNP/BNNK	NILAI DEKTARI	KATEGORI
80	BNN KABUPATEN BANDUNG BARAT	54.01	SANGAT TINGGI
81	BNN KOTA TASIKMALAYA	51.02	TINGGI
82	BNN KABUPATEN SUMEDANG	52.10	TINGGI
<b>RATA-RATA PROVINSI JAWA BARAT</b>		<b>53.82</b>	<b>SANGAT TINGGI</b>
<b>15</b>	<b>BNNP JAWA TENGAH</b>	55.13	SANGAT TINGGI
83	BNN KABUPATEN TEMANGGUNG	54.41	SANGAT TINGGI
84	BNN KOTA TEGAL	55.88	SANGAT TINGGI
85	BNN KABUPATEN BANYUMAS	54.63	SANGAT TINGGI
86	BNN KABUPATEN CILACAP	55.37	SANGAT TINGGI
87	BNN KABUPATEN KENDAL	54.01	SANGAT TINGGI
88	BNN KABUPATEN BATANG	55.72	SANGAT TINGGI
89	BNN KABUPATEN PURBALINGGA	55.73	SANGAT TINGGI
90	BNN KABUPATEN MAGELANG	49.09	RENDAH
91	BNN KOTA SURAKARTA	45.36	SANGAT RENDAH
<b>RATA-RATA PROVINSI JAWA TENGAH</b>		<b>53.53</b>	<b>TINGGI</b>
<b>16</b>	<b>BNNP JAWA TIMUR</b>	54.71	SANGAT TINGGI
92	BNN KABUPATEN SUMENEP	55.67	SANGAT TINGGI
93	BNN KOTA MOJOKERTO	53.49	TINGGI
94	BNN KOTA MALANG	54.85	SANGAT TINGGI
95	BNN KOTA BATU	55.87	SANGAT TINGGI
96	BNN KABUPATEN TULUNGAGUNG	56.07	SANGAT TINGGI
97	BNN KABUPATEN NGANJUK	54.38	SANGAT TINGGI
98	BNN KABUPATEN SIDOARJO	55.21	SANGAT TINGGI
99	BNN KOTA SURABAYA	46.86	RENDAH
100	BNN KOTA KEDIRI	55.65	SANGAT TINGGI
101	BNN KABUPATEN MALANG	55.86	SANGAT TINGGI
102	BNN KABUPATEN GRESIK	44.80	SANGAT RENDAH
103	BNN KABUPATEN TRENGGALEK	54.17	SANGAT TINGGI
104	BNN KABUPATEN LUMAJANG	55.83	SANGAT TINGGI
105	BNN KABUPATEN BLITAR	55.11	SANGAT TINGGI
106	BNN KABUPATEN KEDIRI	55.50	SANGAT TINGGI
107	BNN KABUPATEN PASURUAN	55.87	SANGAT TINGGI
108	BNN KABUPATEN TUBAN	54.87	SANGAT TINGGI
<b>RATA-RATA PROVINSI JAWA TIMUR</b>		<b>54.15</b>	<b>SANGAT TINGGI</b>
<b>17</b>	<b>BNNP KALIMANTAN BARAT</b>	55.59	SANGAT TINGGI
109	BNN KABUPATEN BENGKAYANG	52.02	TINGGI
110	BNN KABUPATEN SINTANG	39.87	SANGAT RENDAH
111	BNN KOTA PONTIANAK	55.79	SANGAT TINGGI
112	BNN KOTA SINGKAWANG	53.51	TINGGI

REKAPITULASI PENGHITUNGAN INDEKS KETAHANAN DIRI REMAJA  
TERHADAP PENYALAHGUNAAN NARKOBA (DEKTARI) TAHUN 2024

NO	NAMA BNNP/BNNK	NILAI DEKTARI	KATEGORI
113	BNN KABUPATEN SANGGAU	45.00	SANGAT RENDAH
114	BNN KABUPATEN MEMPAWAH	48.81	RENDAH
115	BNN KABUPATEN KUBU RAYA	48.70	RENDAH
<b>RATA-RATA PROVINSI KALIMANTAN BARAT</b>		<b>49.91</b>	<b>TINGGI</b>
18	<b>BNNP KALIMANTAN TENGAH</b>	54.16	SANGAT TINGGI
116	BNN KOTA PALANGKARAYA	55.76	SANGAT TINGGI
117	BNN KABUPATEN KOTA WARINGIN BARAT	55.08	SANGAT TINGGI
<b>RATA-RATA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH</b>		<b>55.00</b>	<b>SANGAT TINGGI</b>
19	<b>BNNP KALIMANTAN SELATAN</b>	55.75	SANGAT TINGGI
118	BNN KABUPATEN BARITO KUALA	52.58	TINGGI
119	BNN KOTA BANJARMASIN	53.40	TINGGI
120	BNN KOTA BANJARBARU	55.93	SANGAT TINGGI
121	BNN KABUPATEN BALANGAN	51.04	TINGGI
122	BNN KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN	55.34	SANGAT TINGGI
123	BNN KABUPATEN TANAH LAUT	50.84	TINGGI
124	BNN KABUPATEN TABALONG	51.31	TINGGI
125	BNN KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA	54.62	SANGAT TINGGI
<b>RATA-RATA PROVINSI KALIMANTAN SELATAN</b>		<b>53.42</b>	<b>TINGGI</b>
20	<b>BNNP KALIMANTAN TIMUR</b>	55.89	SANGAT TINGGI
126	BNN KOTA BALIKPAPAN	54.67	SANGAT TINGGI
127	BNN KOTA SAMARINDA	52.45	TINGGI
128	BNN KOTA BONTANG	42.46	SANGAT RENDAH
<b>RATA-RATA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR</b>		<b>51.37</b>	<b>TINGGI</b>
21	<b>BNNP KALIMANTAN UTARA</b>	55.60	SANGAT TINGGI
129	BNN KOTA TARAKAN	58.30	SANGAT TINGGI
130	BNN KABUPATEN NUNUKAN	56.87	SANGAT TINGGI
<b>RATA-RATA PROVINSI KALIMANTAN UTARA</b>		<b>56.92</b>	<b>SANGAT TINGGI</b>
22	<b>BNNP SULAWESI UTARA</b>	51.16	TINGGI
131	BNN KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW	48.16	RENDAH
132	BNN KOTA BITUNG	49.71	RENDAH
133	BNN KOTA MANADO	38.13	SANGAT RENDAH
134	BNN KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE	45.27	SANGAT RENDAH
<b>RATA-RATA PROVINSI SULAWESI UTARA</b>		<b>46.49</b>	<b>RENDAH</b>
23	<b>BNNP SULAWESI TENGAH</b>	52.27	TINGGI
135	BNN KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN	44.29	SANGAT RENDAH
136	BNN KABUPATEN MOROWALI	52.20	TINGGI
137	BNN KOTA PALU	41.55	SANGAT RENDAH
138	BNN KABUPATEN DONGGALA	52.05	TINGGI
139	BNN KABUPATEN POSO	51.89	TINGGI

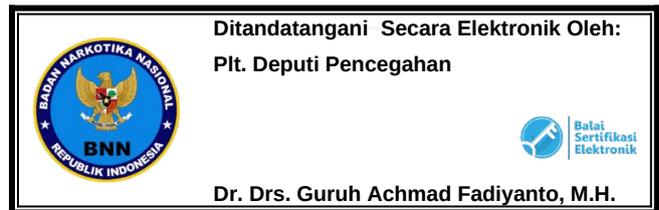
REKAPITULASI PENGHITUNGAN INDEKS KETAHANAN DIRI REMAJA  
TERHADAP PENYALAHGUNAAN NARKOBA (DEKTARI) TAHUN 2024

NO	NAMA BNNP/BNNK	NILAI DEKTARI	KATEGORI
140	BNN KABUPATEN TOJO UNA-UNA	43.40	SANGAT RENDAH
<b>RATA-RATA PROVINSI SULAWESI TENGAH</b>		<b>48.23</b>	<b>RENDAH</b>
24	<b>BNNP SULAWESI SELATAN</b>	53.17	TINGGI
141	BNN KABUPATEN TANA TORAJA	50.11	TINGGI
142	BNN KABUPATEN BONE BOLANGO	50.53	TINGGI
143	BNN KOTA PALOPO	54.52	SANGAT TINGGI
<b>RATA-RATA PROVINSI SULAWESI SELATAN</b>		<b>52.08</b>	<b>TINGGI</b>
25	<b>BNNP SULAWESI TENGGARA</b>	54.55	SANGAT TINGGI
144	BNN KABUPATEN MUNA	50.99	TINGGI
145	BNN KABUPATEN KOLAKA	50.22	TINGGI
146	BNN KOTA KENDARI	54.96	SANGAT TINGGI
147	BNN KOTA BAU-BAU	56.68	SANGAT TINGGI
<b>RATA-RATA PROVINSI SULAWESI TENGGARA</b>		<b>53.48</b>	<b>TINGGI</b>
26	<b>BNNP SULAWESI BARAT</b>	54.67	SANGAT TINGGI
148	BNN KABUPATEN POLEWALI MANDAR	51.49	TINGGI
<b>RATA-RATA PROVINSI SULAWESI BARAT</b>		<b>53.08</b>	<b>TINGGI</b>
27	<b>BNNP MALUKU</b>	46.69	RENDAH
149	BNN KABUPATEN BURU SELATAN	41.04	SANGAT RENDAH
150	BNN KOTA TUAL	54.73	SANGAT TINGGI
<b>RATA-RATA PROVINSI MALUKU</b>		<b>47.49</b>	<b>RENDAH</b>
28	<b>BNNP MALUKU UTARA</b>	54.68	SANGAT TINGGI
151	BNN KABUPATEN PULAU MOROTAI	49.67	RENDAH
152	BNN KOTA TIDORE KEPULAUAN	55.35	SANGAT TINGGI
153	BNN KABUPATEN HALMAHERA UTARA	50.91	TINGGI
<b>RATA-RATA PROVINSI MALUKU UTARA</b>		<b>52.66</b>	<b>TINGGI</b>
29	<b>BNNP BALI</b>	55.80	SANGAT TINGGI
154	BNN KOTA DENPASAR	59.17	SANGAT TINGGI
155	BNN KABUPATEN BADUNG	50.41	TINGGI
156	BNN KABUPATEN GIANYAR	47.33	RENDAH
157	BNN KABUPATEN BULELENG	55.71	SANGAT TINGGI
158	BNN KABUPATEN KLUNGKUNG	44.95	SANGAT RENDAH
159	BNN KABUPATEN KARANGASEM	55.86	SANGAT TINGGI
<b>RATA-RATA PROVINSI BALI</b>		<b>52.75</b>	<b>TINGGI</b>
30	<b>BNNP NUSA TENGGARA BARAT</b>	55.73	SANGAT TINGGI
160	BNN KABUPATEN BIMA	54.01	SANGAT TINGGI
161	BNN KOTA MATARAM	55.83	SANGAT TINGGI
162	BNN KABUPATEN SUMBAWA BARAT	46.26	RENDAH
163	BNN KABUPATEN SUMBAWA	52.70	TINGGI
<b>RATA-RATA PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT</b>		<b>52.91</b>	<b>TINGGI</b>

REKAPITULASI PENGHITUNGAN INDEKS KETAHANAN DIRI REMAJA  
TERHADAP PENYALAHGUNAAN NARKOBA (DEKTARI) TAHUN 2024

NO	NAMA BNNP/BNNK	NILAI DEKTARI	KATEGORI
31	<b>BNNP NUSA TENGGARA TIMUR</b>	55.16	SANGAT TINGGI
164	BNN KABUPATEN BELU	55.55	SANGAT TINGGI
165	BNN KOTA KUPANG	40.98	SANGAT RENDAH
166	BNN KABUPATEN ROTE NDAO	51.24	TINGGI
<b>RATA-RATA PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR</b>		<b>50.73</b>	<b>TINGGI</b>
32	<b>BNNP GORONTALO</b>	55.06	SANGAT TINGGI
167	BNN KABUPATEN BOALEMO	55.61	SANGAT TINGGI
168	BNN KOTA GORONTALO	52.57	TINGGI
169	BNN KABUPATEN BONE BOLANGO	51.11	TINGGI
170	BNN KABUPATEN GORONTALO	53.37	TINGGI
171	BNN KABUPATEN GORONTALO UTARA	56.49	SANGAT TINGGI
<b>RATA-RATA PROVINSI GORONTALO</b>		<b>54.03</b>	<b>SANGAT TINGGI</b>
33	<b>BNNP PAPUA</b>	51.70	TINGGI
172	BNN KABUPATEN MIMIKA	51.58	TINGGI
173	BNN KABUPATEN JAYAPURA	39.24	SANGAT RENDAH
<b>RATA-RATA PROVINSI PAPUA</b>		<b>47.51</b>	<b>RENDAH</b>
34	<b>BNNP PAPUA BARAT</b>	54.58	SANGAT TINGGI
<b>RATA-RATA NILAI TAHUN 2024</b>		<b>52.04</b>	<b>TINGGI</b>

a.n. Kepala Badan Narkotika Nasional





**BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA  
(NATIONAL NARCOTICS BOARD REPUBLIC OF INDONESIA)**

Jl. MT. Haryono No. 11 Cawang Jakarta Timur

Telepon : (62-21) 80871566, 80871567

Faksimili : (62-21) 80885225, 80871591, 80871592, 80871593

e-mail : info@bnn.go.id website : www.bnn.go.id

Nomor : B/4201/XII/DE/PC.01/2024/BNN  
Klasifikasi : Biasa  
Lampiran : 2 (dua) berkas  
Perihal : Hasil Penghitungan Indeks Ketahanan  
Keluarga terhadap Penyalahgunaan  
Narkoba (Dektara) Tahun 2024

Jakarta, 23 Desember 2024

Kepada

Yth. **1. Para Kepala BNN Provinsi**  
**2. Para Kepala BNN Kabupaten/Kota**

di

Tempat

1. Rujukan :

- a. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- b. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;
- c. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota;
- d. Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional RI Nomor 6 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Narkotika Nasional 2020-2024;
- e. Program Kerja Deputi Bidang Pencegahan BNN Tahun Anggaran 2024.

2. Sehubungan dengan rujukan tersebut di atas, bersama ini disampaikan kepada Kepala BNN Provinsi dan BNN Kabupaten/Kota hasil penghitungan Indeks Ketahanan Keluarga terhadap Penyalahgunaan Narkoba (Dektara) yang merupakan pencapaian Indikator Kinerja Direktorat Advokasi Tahun 2024 sesuai Peraturan Kepala BNN RI Nomor 6 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Narkotika Nasional 2020-2024, dengan hasil sebagai berikut :

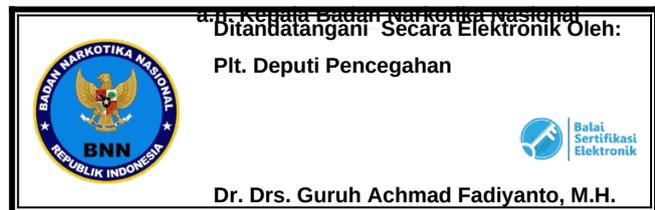
- a. Penghitungan Indeks Ketahanan Keluarga Anti Narkoba menggunakan aplikasi Dektara yaitu setiap BNNP dan BNNKab/Kota memilih Desa/Kelurahan yang akan menjadi tempat pelaksanaan kegiatan Intervensi Ketahanan Keluarga Anti Narkoba, kemudian mengambil sampel dari keluarga yang telah di intervensi (keluarga yang terdiri dari anak dan orang tua). Pengukuran ini dilakukan secara nasional di 34 Provinsi dan data yang dikumpulkan di setiap Provinsi berasal dari Kabupaten/Kota yang sudah ada BNN Kabupaten/Kota yaitu 173 Kabupaten/Kota.

/b. Hasil...

b. Hasil angka penghitungan Deklara Tahun 2024 adalah 86,787 (Kategori Tinggi) dengan target angka 78,70 (Kategori Tinggi), Adapun klasifikasi capaian wilayah sebagai berikut :

- 1) Kategori sangat tinggi (88,31 – 100,00) sebanyak 83 Satuan Kerja
  - 2) Kategori tinggi (76,61 – 88,30) sebanyak 118 Satuan Kerja
  - 3) Kategori rendah (65,00 – 76,60) sebanyak 7 Satuan Kerja
  - 4) Kategori sangat rendah (25,00 – 64,99) sebanyak 0 Satuan Kerja
- Daftar hasil penghitungan terlampir.

3. Berdasarkan dengan butir satu dan dua di atas, diucapkan terima kasih atas partisipasi jajaran Pencegahan dalam Proses Penghitungan Deklara Tahun 2024 dan semoga dapat terus meningkatkan hasil capaian kinerja wilayah pada tahun berikutnya.
4. Demikian untuk menjadi maklum, atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.



Tembusan :

1. Kepala BNN;
2. Sekretaris Utama BNN;
3. Inspektur Utama BNN.

**HASIL PENGHITUNGAN INDEKS KETAHANAN KELUARGA  
TERHADAP PENYALAHGUNAAN NARKOBA (DEKTARA) TAHUN 2024**

NO	SATUAN KERJA	NILAI DEKTARA	KATEGORI
1	2	3	4
1	BNN PUSAT	84,643	TINGGI
2	BNNP NANGGROE ACEH DARUSSALAM	84,911	TINGGI
3	BNN KABUPATEN ACEH SELATAN	80,446	TINGGI
4	BNN KABUPATEN GAYO LUES	80,357	TINGGI
5	BNN KABUPATEN PIDIE JAYA	80,536	TINGGI
6	BNN KOTA SABANG	95,714	SANGAT TINGGI
7	BNN KOTA LHOKSEUMAWE	93,482	SANGAT TINGGI
8	BNN KOTA LANGSA	86,339	TINGGI
9	BNN KABUPATEN BIREUEN	91,429	SANGAT TINGGI
10	BNN KABUPATEN ACEH TAMIANG	94,732	SANGAT TINGGI
11	BNN KABUPATEN PIDIE	81,250	TINGGI
12	BNN KOTA BANDA ACEH	79,911	TINGGI
13	BNNP SUMATERA UTARA	91,964	SANGAT TINGGI
14	BNN KABUPATEN KARO	84,107	TINGGI
15	BNN KOTA BINJAI	89,732	SANGAT TINGGI
16	BNN KOTA TANJUNG BALAI	84,018	TINGGI
17	BNN KOTA GUNUNGSITOLI	85,714	TINGGI
18	BNN KABUPATEN DELI SERDANG	92,768	SANGAT TINGGI
19	BNN KOTA PEMATANG SIANTAR	81,518	TINGGI
20	BNN KABUPATEN LANGKAT	82,232	TINGGI
21	BNN KABUPATEN ASAHAN	87,054	TINGGI
22	BNN KABUPATEN MANDAILING NATAL	87,768	TINGGI
23	BNN KABUPATEN TAPANULI SELATAN	96,250	SANGAT TINGGI

LAMPIRAN I  
SURAT KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL  
NOMOR : B/4201/XII/DE/PC.01/2024/BNN  
TANGGAL : 23 Desember 2024

NO	SATUAN KERJA	NILAI DEKTARA	KATEGORI
1	2	3	4
24	BNN KABUPATEN SERDANG BEDAGAI	90,625	SANGAT TINGGI
25	BNN KOTA TEBING TINGGI	80,179	TINGGI
26	BNN KABUPATEN SIMALUNGUN	77,679	TINGGI
27	BNN KABUPATEN LABUHANBATU UTARA	91,964	SANGAT TINGGI
28	BNN KABUPATEN BATU BARA	78,393	TINGGI
<b>29</b>	<b>BNNP SUMATERA BARAT</b>	86,071	TINGGI
30	BNN KOTA SAWAHLUNTO	81,786	TINGGI
31	BNN KOTA PAYAKUMBUH	95,000	SANGAT TINGGI
32	BNN KABUPATEN SOLOK	88,036	TINGGI
33	BNN KABUPATEN PASAMAN BARAT	88,214	TINGGI
<b>34</b>	<b>BNNP RIAU</b>	93,571	SANGAT TINGGI
35	BNN KABUPATEN KUANTAN SINGINGI	94,286	SANGAT TINGGI
36	BNN KABUPATEN PELALAWAN	90,714	SANGAT TINGGI
37	BNN KOTA PEKANBARU	87,054	TINGGI
38	BNN KOTA DUMAI	90,179	SANGAT TINGGI
<b>39</b>	<b>BNNP JAMBI</b>	90,000	SANGAT TINGGI
40	BNN KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR	85,804	TINGGI
41	BNN KOTA JAMBI	85,982	TINGGI
42	BNN KABUPATEN BATANGHARI	85,268	TINGGI
<b>43</b>	<b>BNNP LAMPUNG</b>	89,821	SANGAT TINGGI
44	BNN KABUPATEN TANGGAMUS	83,304	TINGGI
45	BNN KABUPATEN LAMPUNG SELATAN	89,643	SANGAT TINGGI
46	BNN KOTA METRO	88,125	TINGGI
47	BNN KABUPATEN LAMPUNG TIMUR	90,982	SANGAT TINGGI
48	BNN KABUPATEN WAY KANAN	82,768	TINGGI

LAMPIRAN I  
SURAT KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL  
NOMOR : B/4201/XII/DE/PC.01/2024/BNN  
TANGGAL : 23 Desember 2024

NO	SATUAN KERJA	NILAI DEKTARA	KATEGORI
1	2	3	4
49	<b>BNNP KEPULAUAN RIAU</b>	93,393	SANGAT TINGGI
50	BNN KABUPATEN KARIMUN	92,679	SANGAT TINGGI
51	BNN KOTA BATAM	85,446	TINGGI
52	BNN KOTA TANJUNG PINANG	93,214	SANGAT TINGGI
53	<b>BNNP SUMATERA SELATAN</b>	83,214	TINGGI
54	BNN KABUPATEN OGAN ILIR	77,411	TINGGI
55	BNN KOTA PAGARALAM	86,696	TINGGI
56	BNN KOTA LUBUKLINGGAU	95,714	SANGAT TINGGI
57	BNN KABUPATEN EMPAT LAWANG	86,696	TINGGI
58	BNN KOTA PRABUMULIH	86,339	TINGGI
59	BNN KABUPATEN MUARA ENIM	87,768	TINGGI
60	BNN KABUPATEN MUSI RAWAS	81,161	TINGGI
61	BNN KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR	88,750	SANGAT TINGGI
62	BNN KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR	88,393	SANGAT TINGGI
63	<b>BNNP KEPULAUAN BANGKA BELITUNG</b>	84,732	TINGGI
64	BNN KABUPATEN BANGKA	90,714	SANGAT TINGGI
65	BNN KOTA PANGKAL PINANG	84,107	TINGGI
66	BNN KABUPATEN BELITUNG	82,679	TINGGI
67	BNN KABUPATEN BANGKA SELATAN	93,214	SANGAT TINGGI
68	<b>BNNP BENGKULU</b>	81,518	TINGGI
69	BNN KOTA BENGKULU	92,857	SANGAT TINGGI
70	BNN KABUPATEN BENGKULU SELATAN	83,393	TINGGI
71	<b>BNNP DKI JAKARTA</b>	85,982	TINGGI
72	BNN KOTA JAKARTA SELATAN	75,982	RENDAH
73	BNN KOTA JAKARTA TIMUR	79,286	TINGGI

LAMPIRAN I  
SURAT KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL  
NOMOR : B/4201/XII/DE/PC.01/2024/BNN  
TANGGAL : 23 Desember 2024

NO	SATUAN KERJA	NILAI DEKTARA	KATEGORI
1	2	3	4
74	BNN KOTA JAKARTA UTARA	93,393	SANGAT TINGGI
<b>75</b>	<b>BNNP BANTEN</b>	91,607	SANGAT TINGGI
76	BNN KOTA TANGERANG SELATAN	82,054	TINGGI
77	BNN KOTA CILEGON	86,429	TINGGI
78	BNN KOTA TANGERANG	85,179	TINGGI
<b>79</b>	<b>BNNP JAWA BARAT</b>	82,589	TINGGI
80	BNN KABUPATEN BOGOR	96,339	SANGAT TINGGI
81	BNN KABUPATEN CIANJUR	89,018	SANGAT TINGGI
82	BNN KOTA BANDUNG	96,071	SANGAT TINGGI
83	BNN KOTA CIREBON	96,875	SANGAT TINGGI
84	BNN KOTA CIMAHI	91,875	SANGAT TINGGI
85	BNN KABUPATEN SUKABUMI	86,071	TINGGI
86	BNN KABUPATEN GARUT	81,071	TINGGI
87	BNN KABUPATEN KUNINGAN	89,107	SANGAT TINGGI
88	BNN KABUPATEN CIAMIS	89,464	SANGAT TINGGI
89	BNN KOTA DEPOK	88,393	SANGAT TINGGI
90	BNN KABUPATEN KARAWANG	84,018	TINGGI
91	BNN KABUPATEN BANDUNG BARAT	78,304	TINGGI
92	BNN KOTA TASIKMALAYA	85,625	TINGGI
93	BNN KABUPATEN SUMEDANG	83,839	TINGGI
<b>94</b>	<b>BNNP JAWA TENGAH</b>	87,321	TINGGI
95	BNN KABUPATEN TEMANGGUNG	84,464	TINGGI
96	BNN KOTA TEGAL	89,107	SANGAT TINGGI
97	BNN KABUPATEN BANYUMAS	91,518	SANGAT TINGGI
98	BNN KABUPATEN CILACAP	86,161	TINGGI

LAMPIRAN I  
SURAT KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL  
NOMOR : B/4201/XII/DE/PC.01/2024/BNN  
TANGGAL : 23 Desember 2024

NO	SATUAN KERJA	NILAI DEKTARA	KATEGORI
1	2	3	4
99	BNN KABUPATEN KENDAL	86,607	TINGGI
100	BNN KABUPATEN BATANG	93,125	SANGAT TINGGI
101	BNN KABUPATEN PURBALINGGA	90,268	SANGAT TINGGI
102	BNN KABUPATEN MAGELANG	82,857	TINGGI
103	BNN KOTA SURAKARTA	86,518	TINGGI
<b>104</b>	<b>BNNP DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA</b>	92,679	SANGAT TINGGI
105	BNN KABUPATEN SLEMAN	90,268	SANGAT TINGGI
106	BNN KOTA YOGYAKARTA	93,304	SANGAT TINGGI
107	BNN KABUPATEN BANTUL	92,054	SANGAT TINGGI
<b>108</b>	<b>BNNP JAWA TIMUR</b>	90,179	SANGAT TINGGI
109	BNN KABUPATEN SUMENEP	87,946	TINGGI
110	BNN KOTA MOJOKERTO	81,875	TINGGI
111	BNN KOTA MALANG	82,500	TINGGI
112	BNN KOTA BATU	90,179	SANGAT TINGGI
113	BNN KABUPATEN TULUNGAGUNG	90,000	SANGAT TINGGI
114	BNN KABUPATEN NGANJUK	90,446	SANGAT TINGGI
115	BNN KABUPATEN SIDOARJO	84,821	TINGGI
116	BNN KOTA SURABAYA	87,411	TINGGI
117	BNN KOTA KEDIRI	91,696	SANGAT TINGGI
118	BNN KABUPATEN MALANG	94,375	SANGAT TINGGI
119	BNN KABUPATEN GRESIK	87,589	TINGGI
120	BNN KABUPATEN TRENGGALEK	96,875	SANGAT TINGGI
121	BNN KABUPATEN LUMAJANG	94,821	SANGAT TINGGI
122	BNN KABUPATEN BLITAR	84,286	TINGGI
123	BNN KABUPATEN KEDIRI	85,625	TINGGI

LAMPIRAN I  
SURAT KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL  
NOMOR : B/4201/XII/DE/PC.01/2024/BNN  
TANGGAL : 23 Desember 2024

NO	SATUAN KERJA	NILAI DEKTARA	KATEGORI
1	2	3	4
124	BNN KABUPATEN PASURUAN	92,321	SANGAT TINGGI
125	BNN KABUPATEN TUBAN	80,268	TINGGI
<b>126</b>	<b>BNNP KALIMANTAN BARAT</b>	92,857	SANGAT TINGGI
127	BNN KABUPATEN BENGKAYANG	81,429	TINGGI
128	BNN KABUPATEN SINTANG	82,946	TINGGI
129	BNN KOTA PONTIANAK	94,196	SANGAT TINGGI
130	BNN KOTA SINGKAWANG	77,679	TINGGI
131	BNN KABUPATEN SANGGAU	84,554	TINGGI
132	BNN KABUPATEN MEMPAWAH	89,554	SANGAT TINGGI
133	BNN KABUPATEN KUBU RAYA	87,768	TINGGI
<b>134</b>	<b>BNNP KALIMANTAN TENGAH</b>	88,661	SANGAT TINGGI
135	BNN KOTA PALANGKARAYA	89,107	SANGAT TINGGI
136	BNN KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT	95,000	SANGAT TINGGI
<b>137</b>	<b>BNNP KALIMANTAN SELATAN</b>	84,107	TINGGI
138	BNN KABUPATEN BARITO KUALA	90,179	SANGAT TINGGI
139	BNN KOTA BANJARMASIN	96,607	SANGAT TINGGI
140	BNN KOTA BANJARBARU	85,804	TINGGI
141	BNN KABUPATEN BALANGAN	86,518	TINGGI
142	BNN KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN	82,857	TINGGI
143	BNN KABUPATEN TANAH LAUT	80,268	TINGGI
144	BNN KABUPATEN TABALONG	86,875	TINGGI
145	BNN KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA	89,732	SANGAT TINGGI
<b>146</b>	<b>BNNP KALIMANTAN TIMUR</b>	92,589	SANGAT TINGGI
147	BNN KOTA BALIKPAPAN	91,518	SANGAT TINGGI
148	BNN KOTA SAMARINDA	85,179	TINGGI

LAMPIRAN I  
SURAT KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL  
NOMOR : B/4201/XII/DE/PC.01/2024/BNN  
TANGGAL : 23 Desember 2024

NO	SATUAN KERJA	NILAI DEKTARA	KATEGORI
1	2	3	4
149	BNN KOTA BONTANG	90,804	SANGAT TINGGI
<b>150</b>	<b>BNNP NUSA TENGGARA BARAT</b>	81,964	TINGGI
151	BNN KABUPATEN BIMA	94,821	SANGAT TINGGI
152	BNN KOTA MATARAM	95,536	SANGAT TINGGI
153	BNN KABUPATEN SUMBAWA BARAT	99,375	SANGAT TINGGI
154	BNN KABUPATEN SUMBAWA	79,286	TINGGI
<b>155</b>	<b>BNNP KALIMANTAN UTARA</b>	80,179	TINGGI
156	BNN KOTA TARAKAN	94,732	SANGAT TINGGI
157	BNN KABUPATEN NUNUKAN	91,339	SANGAT TINGGI
<b>158</b>	<b>BNNP SULAWESI UTARA</b>	81,786	TINGGI
159	BNN KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW	95,982	SANGAT TINGGI
160	BNN KOTA BITUNG	77,589	TINGGI
161	BNN KOTA MANADO	75,804	RENDAH
162	BNN KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE	95,893	SANGAT TINGGI
<b>163</b>	<b>BNNP SULAWESI TENGAH</b>	84,375	TINGGI
164	BNN KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN	80,625	TINGGI
165	BNN KABUPATEN MOROWALI	76,964	TINGGI
166	BNN KOTA PALU	82,143	TINGGI
167	BNN KABUPATEN DONGGALA	77,411	TINGGI
168	BNN KABUPATEN POSO	70,625	RENDAH
169	BNN KABUPATEN TOJO UNA-UNA	81,696	TINGGI
<b>170</b>	<b>BNNP SULAWESI SELATAN</b>	82,321	TINGGI
171	BNN KABUPATEN TANA TORAJA	95,179	SANGAT TINGGI
172	BNN KABUPATEN BONE	79,821	TINGGI
173	BNN KOTA PALOPO	88,304	TINGGI

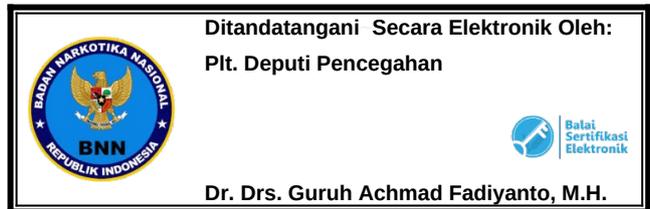
LAMPIRAN I  
SURAT KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL  
NOMOR : B/4201/XII/DE/PC.01/2024/BNN  
TANGGAL : 23 Desember 2024

NO	SATUAN KERJA	NILAI DEKTARA	KATEGORI
1	2	3	4
174	<b>BNNP SULAWESI TENGGARA</b>	77,589	TINGGI
175	BNN KABUPATEN MUNA	80,804	TINGGI
176	BNN KABUPATEN KOLAKA	86,786	TINGGI
177	BNN KOTA KENDARI	75,982	RENDAH
178	BNN KOTA BAU-BAU	82,321	TINGGI
179	<b>BNNP SULAWESI BARAT</b>	85,357	TINGGI
180	BNN KABUPATEN POLEWALI MANDAR	83,125	TINGGI
181	<b>BNNP MALUKU</b>	84,464	TINGGI
182	BNN KABUPATEN BURU SELATAN	83,482	TINGGI
183	BNN KOTA TUAL	79,732	TINGGI
184	<b>BNNP MALUKU UTARA</b>	88,482	SANGAT TINGGI
185	BNN KABUPATEN PULAU MOROTAI	76,429	RENDAH
186	BNN KOTA TIDORE KEPULAUAN	75,893	RENDAH
187	BNN KABUPATEN HALMAHERA UTARA	75,179	RENDAH
188	<b>BNNP BALI</b>	84,375	TINGGI
189	BNN KOTA DENPASAR	84,821	TINGGI
190	BNN KABUPATEN BADUNG	94,375	SANGAT TINGGI
191	BNN KABUPATEN GIANYAR	93,839	SANGAT TINGGI
192	BNN KABUPATEN BULELENG	90,179	SANGAT TINGGI
193	BNN KABUPATEN KLUNGKUNG	90,446	SANGAT TINGGI
194	BNN KABUPATEN KARANGASEM	86,518	TINGGI
195	<b>BNNP NUSA TENGGARA TIMUR</b>	88,929	SANGAT TINGGI
196	BNN KABUPATEN BELU	76,696	TINGGI
197	BNN KOTA KUPANG	84,375	TINGGI
198	BNN KABUPATEN ROTE NDAO	85,893	TINGGI

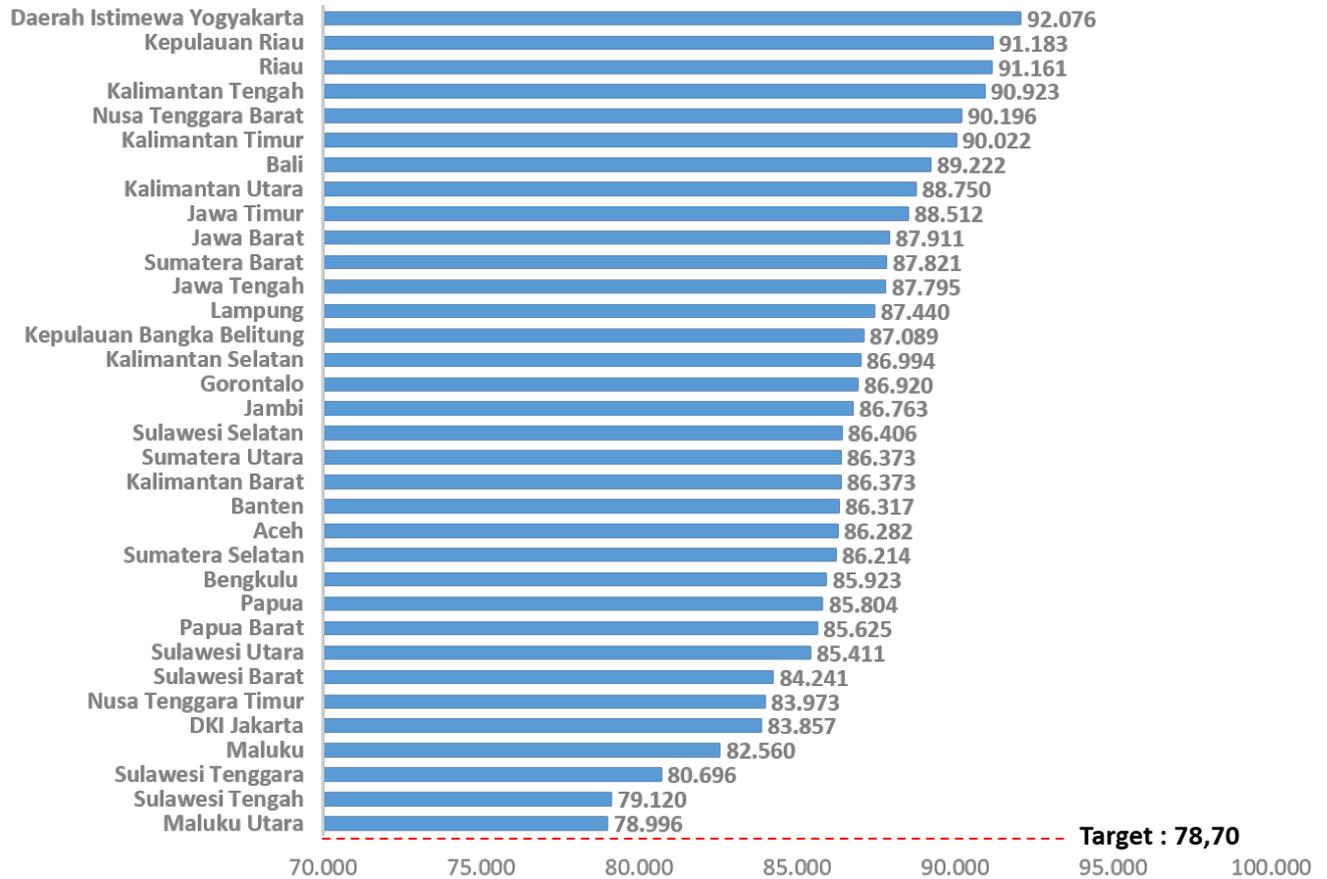
LAMPIRAN I  
SURAT KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL  
NOMOR : B/4201/XII/DE/PC.01/2024/BNN  
TANGGAL : 23 Desember 2024

NO	SATUAN KERJA	NILAI DEKTARA	KATEGORI
1	2	3	4
199	<b>BNNP GORONTALO</b>	87,946	TINGGI
200	BNN KABUPATEN BOALEMO	79,911	TINGGI
201	BNN KOTA GORONTALO	88,036	TINGGI
202	BNN KABUPATEN BONE BOLANGO	85,179	TINGGI
203	BNN KABUPATEN GORONTALO	85,982	TINGGI
204	BNN KABUPATEN GORONTALO UTARA	94,464	SANGAT TINGGI
205	<b>BNNP PAPUA</b>	85,268	TINGGI
206	BNN KABUPATEN MIMIKA	90,089	SANGAT TINGGI
207	BNN KABUPATEN JAYAPURA	82,054	TINGGI
208	<b>BNNP PAPUA BARAT</b>	85,625	TINGGI
<b>NILAI DEKTARA TAHUN 2024</b>		<b>86,787</b>	<b>TINGGI</b>

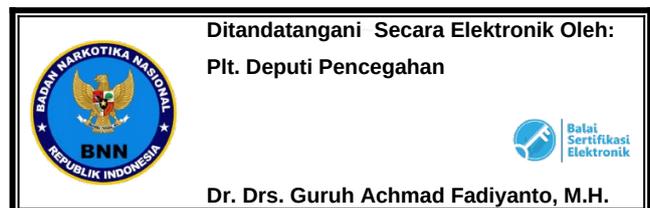
a.n. Kepala Badan Narkotika Nasional



## GRAFIK HASIL PENGHITUNGAN INDEKS KETAHANAN KELUARGA TERHADAP PENYALAHGUNAAN NARKOBA (DEKTARA) TAHUN 2024



a.n. Kepala Badan Narkotika Nasional





**BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA  
(NATIONAL NARCOTICS BOARD REPUBLIC OF INDONESIA)**

Jl. MT. Haryono No. 11 Cawang Jakarta Timur  
Telepon : (62-21) 80871566, 80871567  
Faksimili : (62-21) 80885225, 80871591, 80871592, 80871593  
e-mail : info@bnn.go.id website : www.bnn.go.id

Nomor : B/47/II/DE/RH.02/2025/BNN  
Klasifikasi : Biasa  
Lampiran : 2 (dua) lembar  
Perihal : Penyampaian Hasil Pengukuran IKR,  
IKM dan Presentase Peningkatan  
Kualitas Hidup Tahun 2024

Jakarta, 07 Januari 2025

Kepada

Yth. **Daftar terlampir**

di

Tempat

1. Rujukan :

- a. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- b. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;
- c. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 5 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional;
- d. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota;
- e. Surat Perintah Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor : Sprin/2003/VI/KA/KP. 05.00/2024/BNN tanggal 1 Juni 2024 tentang Penunjukan Pelaksana Tugas (Plt.) Deputi Rehabilitasi BNN;
- f. Program Kerja Deputi Bidang Rehabilitasi Badan Narkotika Nasional Tahun Anggaran 2024.

2. Sehubungan dengan rujukan tersebut di atas, bersama ini disampaikan kepada Kepala bahwa Deputi Bidang Rehabilitasi BNN telah selesai melaksanakan pengukuran Indeks Kapabilitas Rehabilitasi (IKR), pengukuran Indeks Kepuasan Penerima Layanan Rehabilitasi (IKM) dan Presentase Penerima Layanan Rehabilitasi yang mengalami Peningkatan Kualitas Hidup Tahun 2024, yang merupakan capaian kinerja bidang Rehabilitasi dengan hasil sebagaimana terlampir.

3. Berkaitan dengan butir satu dan dua di atas, berkenan Kepala untuk dapat menjadikan hasil dimaksud sebagai dasar dalam meningkatkan capaian kinerja dan peningkatan kualitas bidang rehabilitasi mendatang di wilayah beserta jajaran.
4. Demikian untuk menjadi maklum, atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.



Tembusan :

1. Kepala BNN;
2. Sekretaris Utama BNN;
3. Inspektur Utama BNN;

**DAFTAR BNNP BESERTA JAJARAN DAN UPT REHABILITASI  
YANG TELAH DILAKUKAN  
PENGUKURAN IKM DAN IKR T.A 2024**

---

1. Kepala BNNP Aceh
2. Kepala BNNP Sumatera Utara
3. Kepala BNNP Sumatera Barat
4. Kepala BNNP Bengkulu
5. Kepala BNNP Kepulauan Riau
6. Kepala BNNP Riau
7. Kepala BNNP Jambi
8. Kepala BNNP Kepulauan Bangka Belitung
9. Kepala BNNP Sumatera Selatan
10. Kepala BNNP Lampung
11. Kepala BNNP DKI Jakarta
12. Kepala BNNP Banten
13. Kepala BNNP Jawa Barat
14. Kepala BNNP DI Yogyakarta
15. Kepala BNNP Jawa Tengah
16. Kepala BNNP Jawa Timur
17. Kepala BNNP Kalimantan Barat
18. Kepala BNNP Kalimantan Timur
19. Kepala BNNP Kalimantan Utara
20. Kepala BNNP Kalimantan Tengah
21. Kepala BNNP Kalimantan Selatan
22. Kepala BNNP Bali
23. Kepala BNNP Nusa Tenggara Timur
24. Kepala BNNP Nusa Tenggara Barat
25. Kepala BNNP Sulawesi Utara
26. Kepala BNNP Sulawesi Barat
27. Kepala BNNP Sulawesi Tengah
28. Kepala BNNP Sulawesi Selatan
29. Kepala BNNP Sulawesi Tenggara
30. Kepala BNNP Gorontalo
31. Kepala BNNP Maluku
32. Kepala BNNP Maluku Utara
33. Kepala BNNP Papua
34. Kepala BNNP Papua Barat
35. Kepala Balai Besar Rehabilitasi Lido
36. Kepala Balai Rehabilitasi Baddoka
37. Kepala Balai Rehabilitasi Tanah Merah
38. Kepala Loka Rehabilitasi Kalianda
39. Kepala Loka Rehabilitasi Batam
40. Kepala Loka Rehabilitasi Deli Serdang

**HASIL CAPAIAN KINERJA BIDANG REHABILITASI  
TAHUN 2024**

Satuan Kerja	IKR	IKM	Persentase Kualitas Hidup
<b>BNN</b>	<b>3.51</b>	<b>3.62</b>	<b>85.32</b>
<b>Aceh</b>	<b>3.32</b>	<b>3.6</b>	<b>90.32</b>
BNN Kabupaten Aceh Selatan	3.27	3.51	89.53
BNN Kabupaten Aceh Tamiang	3.26	3.85	83.13
BNN Kabupaten Bireuen	3.70	3.62	96.71
BNN Kabupaten Gayo Lues	3.65	3.52	100.00
BNN Kabupaten Pidie	3.36	3.44	95.83
BNN Kabupaten Pidie Jaya	3.28	3.62	93.42
BNN Kota Banda Aceh	3.35	3.68	91.67
BNN Kota Langsa	3.11	3.84	97.14
BNN Kota Lhokseumawe	3.56	3.3	94.05
BNN Kota Sabang	2.59	3.65	88.64
BNNP Aceh	3.35	3.43	81.32
<b>Sumatera Utara</b>	<b>3.50</b>	<b>3.58</b>	<b>92.43</b>
BNN Kabupaten Asahan	3.58	3.66	98.31
BNN Kabupaten Batu Bara	4.00	3.81	98.81
BNN Kabupaten Deli Serdang	3.9	3.73	78.82
BNN Kabupaten Karo	3.66	3.68	91.67
BNN Kabupaten Labuhanbatu Utara	2.51	3.27	97.92
BNN Kabupaten Langkat	3.49	3.29	79.21
BNN Kabupaten Mandailing Natal	4	3.57	98.44
BNN Kabupaten Serdang Bedagai	2.78	3.52	97.92
BNN Kabupaten Simalungun	3.4	3.53	100.00
BNN Kabupaten Tapanuli Selatan	2.93	3.47	93.48
BNN Kota Binjai	3.8	3.6	84.21
BNN Kota Gunungsitoli	2.65	3.59	100.00
BNN Kota Pematang Siantar	3.86	3.85	95.74
BNN Kota Tanjung Balai	3.61	3.8	84.26
BNN Kota Tebing Tinggi	3.9	3.62	97.39
BNNP Sumatera Utara	3.57	3.68	96.04
<b>Sumatera Barat</b>	<b>3.76</b>	<b>3.5</b>	<b>83.80</b>
BNN Kabupaten Pasaman Barat	3.86	3.27	88.64
BNN Kabupaten Solok	3.85	3.52	87.50
BNN Kota Payakumbuh	3.9	3.6	75.78
BNN Kota Sawahlunto	3.35	3.49	86.90

LAMPIRAN  
SURAT Plt. Deputi Rehabilitasi  
NOMOR : B/47/I/DE/RH.02/2025/BNN  
TANGGAL : 07 Januari 2025

BNNP Sumatera Barat	3.85	3.48	83.56
<b>Riau</b>	3.21	<b>3.69</b>	<b>88.55</b>
BNN Kabupaten Kuantan Singingi	3.49	3.77	94.32
BNN Kabupaten Pelalawan	3.01	3.63	80.92
BNN Kota Dumai	2.73	3.66	85.53
BNN Kota Pekanbaru	3.28	3.58	95.00
BNNP Riau	3.53	3.79	90.32
<b>Kepulauan Riau</b>	3.66	<b>3.72</b>	<b>80.21</b>
BNN Kabupaten Tanjung Balai Karimun	3.19	3.75	98.15
BNN Kota Batam	3.77	3.55	85.71
BNN Kota Tanjung Pinang	3.7	3.71	83.75
BNNP Kepulauan Riau	3.66	3.8	72.73
<b>Kepulauan Bangka Belitung</b>	3.67	<b>3.57</b>	<b>91.56</b>
BNN Kabupaten Bangka	3.52	3.47	94.12
BNN Kabupaten Bangka Selatan	3.55	3.33	91.25
BNN Kabupaten Belitung	3.9	3.83	98.39
BNN Kota Pangkal Pinang	3.69	3.66	97.09
BNNP Kepulauan Bangka Belitung	3.67	3.58	73.28
<b>Bengkulu</b>	<b>3.68</b>	<b>3.69</b>	<b>78.42</b>
BNN Kabupaten Bengkulu Selatan	3.21	3.69	89.63
BNN Kota Bengkulu	3.6	3.62	76.32
BNNP Bengkulu	4.00	3.86	77.13
<b>Jambi</b>	<b>3.24</b>	<b>3.48</b>	<b>85.14</b>
BNN Kabupaten Batang Hari	3.59	3.43	84.68
BNN Kabupaten Tanjung Jabung Timur	2.75	3.67	97.00
BNN Kota Jambi	2.71	3.3	85.89
BNNP Jambi	3.90	3.79	81.46
<b>Sumatera Selatan</b>	<b>3.19</b>	<b>3.63</b>	<b>86.63</b>
BNN Kabupaten Empat Lawang	2.61	3.32	91.94
BNN Kabupaten Muara Enim	3.17	3.77	78.75
BNN Kabupaten Musi Rawas	2.88	3.72	100.00
BNN Kabupaten Ogan Ilir	2.26	3.64	82.50
BNN Kabupaten Ogan Komering Ilir	3.81	3.89	97.97
BNN Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur	2.97	3.5	86.11
BNN Kota Lubuk Linggau	4	3.79	81.45
BNN Kota Pagar Alam	3.03	3.39	94.23
BNN Kota Prabumulih	3.13	3.61	75.69
BNNP Sumatera Selatan	3.7	3.73	83.44
<b>Lampung</b>	<b>3.6</b>	<b>3.65</b>	<b>83.85</b>
BNN Kabupaten Lampung Selatan	2.39	3.82	76.96
BNN Kabupaten Lampung Timur	3.9	3.66	74.52

LAMPIRAN  
 SURAT Plt. Deputi Rehabilitasi  
 NOMOR : B/47/I/DE/RH.02/2025/BNN  
 TANGGAL : 07 Januari 2025

BNN Kabupaten Tanggamus	3.66	3.68	83.33
BNN Kabupaten Way Kanan	3.9	3.45	98.57
BNN Kota Metro	3.9	3.56	88.69
BNNP Lampung	4	3.7	87.18
<b>Banten</b>	<b>3.93</b>	<b>3.57</b>	<b>76.30</b>
BNN Kota Cilegon	4.00	3.82	65.63
BNN Kota Tangerang	3.86	3.59	88.69
BNN Kota Tangerang Selatan	3.86	3.44	77.42
BNNP Banten	4.00	3.52	68.42
<b>DKI Jakarta</b>	<b>3.84</b>	<b>3.65</b>	<b>89.79</b>
BNN Kota Jakarta Selatan	3.91	3.72	75.24
BNN Kota Jakarta Timur	4.00	3.54	92.11
BNN Kota Jakarta Utara	3.63	3.84	99.48
BNNP DKI Jakarta	4.00	3.45	90.05
<b>Jawa Barat</b>	<b>3.56</b>	<b>3.56</b>	<b>80.20</b>
BNN Kabupaten Bandung Barat	3.46	3.44	74.22
BNN Kabupaten Bogor	3.20	3.54	88.31
BNN Kabupaten Ciamis	4.00	3.58	82.64
BNN Kabupaten Cianjur	3.76	3.6	71.88
BNN Kabupaten Garut	3.73	3.86	93.64
BNN Kabupaten Karawang	3.86	3.85	94.32
BNN Kabupaten Kuningan	3.38	3.3	93.27
BNN Kabupaten Sukabumi	3.11	3.28	48.75
BNN Kabupaten Sumedang	3.57	3.47	70.00
BNN Kota Bandung	3.31	3.52	63.69
BNN Kota Cimahi	3.72	3.64	86.23
BNN Kota Cirebon	3.56	3.57	82.69
BNN Kota Depok	3.17	3.5	88.28
BNN Kota Tasikmalaya	3.57	3.59	88.54
BNNP Jawa Barat	3.62	3.53	75.78
<b>Jawa Tengah</b>	<b>3.70</b>	<b>3.62</b>	<b>85.40</b>
BNN Kabupaten Banyumas	3.75	3.9	90.15
BNN Kabupaten Batang	3.61	3.65	89.19
BNN Kabupaten Cilacap	3.62	3.43	98.53
BNN Kabupaten Kendal	3.49	3.53	90.00
BNN Kabupaten Magelang	3.53	3.52	87.10
BNN Kabupaten Purbalingga	3.49	3.57	76.85
BNN Kabupaten Temanggung	4.00	3.82	98.75
BNN Kota Surakarta	3.90	3.53	84.85
BNN Kota Tegal	3.63	3.41	85.19
BNNP Jawa Tengah	4.00	3.7	68.40

LAMPIRAN

SURAT Plt. Deputi Rehabilitasi

NOMOR : B/47/I/DE/RH.02/2025/BNN

TANGGAL : 07 Januari 2025

<b>D.I.Yogyakarta</b>	<b>3.74</b>	<b>3.83</b>	<b>87.64</b>
BNN Kabupaten Bantul	4.00	3.84	86.27
BNN Kabupaten Sleman	4.00	3.87	91.42
BNN Kota Yogyakarta	2.94	3.82	81.25
BNNP D.I.Yogyakarta	4.00	3.79	87.38
<b>Jawa Timur</b>	<b>3.66</b>	<b>3.6</b>	<b>87.46</b>
BNN Kabupaten Blitar	4.00	3.4	80.26
BNN Kabupaten Gresik	4.00	3.75	86.90
BNN Kabupaten Kediri	3.32	3.36	97.28
BNN Kabupaten Lumajang	3.39	3.62	83.82
BNN Kabupaten Malang	3.70	3.53	82.81
BNN Kabupaten Nganjuk	3.49	3.56	91.67
BNN Kabupaten Pasuruan	3.27	3.21	97.50
BNN Kabupaten Sidoarjo	3.80	3.89	92.50
BNN Kabupaten Sumenep	2.93	3.37	79.17
BNN Kabupaten Trenggeng	3.99	3.57	91.67
BNN Kabupaten Tuban	3.90	3.6	87.93
BNN Kabupaten Tulungagung	3.28	3.62	77.78
BNN Kota Batu	4.00	3.73	96.59
BNN Kota Kediri	3.62	3.45	71.88
BNN Kota Malang	4.00	3.87	78.70
BNN Kota Mojokerto	3.70	3.74	83.65
BNN Kota Surabaya	3.76	3.46	85.37
BNNP Jawa Timur	3.81	3.87	96.54
<b>Kalimantan Barat</b>	<b>3.23</b>	<b>3.57</b>	<b>88.79</b>
BNN Kabupaten Bengkayang	3.79	3.56	86.84
BNN Kabupaten Kubu Raya	3.35	3.74	79.81
BNN Kabupaten Mempawah	3.9	3.89	95.83
BNN Kabupaten Sanggau	2.34	3.42	90.48
BNN Kabupaten Sintang	2.89	3.67	95.19
BNN Kota Pontianak	3.7	3.73	96.53
BNN Kota Singkawang	2.61	3.43	86.36
BNNP Kalimantan Barat	3.25	3.49	80.63
<b>Kalimantan Selatan</b>	<b>3.43</b>	<b>3.68</b>	<b>90.69</b>
BNN Kabupaten Balangan	3.43	3.56	94.32
BNN Kabupaten Barito Kuala	3.45	3.63	97.78
BNN Kabupaten Hulu Sungai Selatan	3.17	3.62	75.00
BNN Kabupaten Hulu Sungai Utara	3.65	3.73	98.61
BNN Kabupaten Tabalong	3.86	3.74	93.75
BNN Kabupaten Tanah Laut	2.71	3.8	56.41
BNN Kota Banjarbaru	4	3.79	84.92

LAMPIRAN  
 SURAT Plt. Deputi Rehabilitasi  
 NOMOR : B/47/I/DE/RH.02/2025/BNN  
 TANGGAL : 07 Januari 2025

BNN Kota Banjarmasin	2.91	3.66	97.79
BNNP Kalimantan Selatan	3.7	3.68	99.55
<b>Kalimantan Tengah</b>	<b>3.95</b>	<b>3.7</b>	<b>79.64</b>
BNN Kabupaten Kotawaringin Barat	3.86	3.69	81.06
BNN Kota Palangkaraya	4	3.71	75.64
BNNP Kalimantan Tengah	4	3.7	81.01
<b>Kalimantan Timur</b>	<b>3.73</b>	<b>3.7</b>	<b>84.05</b>
BNN Kota Balikpapan	3.38	3.65	80.85
BNN Kota Bontang	3.39	3.36	78.85
BNN Kota Samarinda	3.91	3.8	87.50
BNNP Kalimantan Timur	3.99	3.75	82.03
<b>Kalimantan Utara</b>	<b>3.83</b>	<b>3.47</b>	<b>94.66</b>
BNN Kabupaten Nunukan	4	3.56	91.67
BNN Kota Tarakan	3.59	3.36	97.09
BNNP Kalimantan Utara	3.91	3.6	93.00
<b>Bali</b>	<b>3.72</b>	<b>3.65</b>	<b>91.18</b>
BNN Kabupaten Badung	3.89	3.68	65.28
BNN Kabupaten Buleleng	3.86	3.46	100.00
BNN Kabupaten Gianyar	3.61	3.31	70.45
BNN Kabupaten Karangasem	3.32	3.56	100.00
BNN Kabupaten Klungkung	3.86	3.94	95.00
BNN Kota Denpasar	3.62	3.61	84.26
BNNP Bali	3.90	3.84	93.06
<b>Nusa Tenggara Barat</b>	<b>3.92</b>	<b>3.72</b>	<b>83.95</b>
BNN Kabupaten Bima	4	3.61	82.81
BNN Kabupaten Sumbawa	3.9	3.69	86.67
BNN Kabupaten Sumbawa Barat	3.69	3.65	83.75
BNN Kota Mataram	4.00	3.81	85.80
BNNP Nusa Tenggara Barat	4.00	3.75	80.59
<b>Nusa Tenggara Timur</b>	<b>3.26</b>	<b>3.77</b>	<b>87.18</b>
BNN Kabupaten Belu	3.18	3.8	100.00
BNN Kabupaten Rote Ndao	3.66	3.91	100.00
BNN Kota Kupang	2.54	3.55	100.00
BNNP Nusa Tenggara Timur	3.67	3.79	80.77
<b>Sulawesi Utara</b>	<b>3.18</b>	<b>3.59</b>	<b>92.83</b>
BNN Kabupaten Bolaang Mongondow	3.76	3.82	100.00
BNN Kabupaten Kepulauan Sangihe	2.79	3.9	89.17
BNN Kota Bitung	3.11	3.63	93.57
BNN Kota Manado	2.85	3.74	90.82
BNNP Sulawesi Utara	3.37	3.4	93.27
<b>Gorontalo</b>	<b>3.2</b>	<b>3.5</b>	<b>77.17</b>

LAMPIRAN  
 SURAT Plt. Deputi Rehabilitasi  
 NOMOR : B/47/I/DE/RH.02/2025/BNN  
 TANGGAL : 07 Januari 2025

BNN Kabupaten Boalemo	3.41	3.25	93.75
BNN Kabupaten Bone Bolango	3.07	3.64	71.88
BNN Kabupaten Gorontalo	3.23	3.57	58.33
BNN Kabupaten Gorontalo Utara	2.77	3.24	87.50
BNN Kota Gorontalo	2.85	3.49	75.00
BNNP Gorontalo	3.90	3.54	78.13
<b>Sulawesi Barat</b>	<b>3.50</b>	<b>3.52</b>	<b>97.22</b>
BNN Kabupaten Polewali Mandar	3.53	3.36	100.00
BNNP Sulawesi Barat	3.47	3.59	96.67
<b>Sulawesi Selatan</b>	<b>3.81</b>	<b>3.65</b>	<b>87.56</b>
BNN Kabupaten Bone	4	3.89	95.44
BNN Kabupaten Tana Toraja	3.79	3.46	72.58
BNN Kota Palopo	3.57	3.51	77.30
BNNP Sulawesi Selatan	3.67	3.54	89.72
<b>Sulawesi Tengah</b>	<b>2.94</b>	<b>3.6</b>	<b>75.83</b>
BNN Kabupaten Banggai Kepulauan	3.46	3.24	25.00
BNN Kabupaten Donggala	2.84	3.68	81.48
BNN Kabupaten Morowali	1.89		92.86
BNN Kabupaten Poso	2.22	3.64	71.00
BNN Kabupaten Tojo Una-Una	4	3.72	95.51
BNN Kota Palu	3.37	3.84	63.28
BNNP Sulawesi Tengah	2.78	3.34	72.97
<b>Sulawesi Tenggara</b>	<b>3.47</b>	<b>3.54</b>	<b>92.14</b>
BNN Kabupaten Kolaka	3.6	3.63	99.07
BNN Kabupaten Muna	3.62	3.4	99.09
BNN Kota Baubau	2.24	3.64	93.75
BNN Kota Kendari	3.89	3.59	67.86
BNNP Sulawesi Tenggara	3.99	3.53	89.44
<b>Maluku</b>	<b>3.23</b>	<b>3.22</b>	<b>72.00</b>
BNN Kabupaten Buru Selatan	3.27	3.47	75.00
BNN Kota Tual	2.79	3.4	47.22
BNNP Maluku	3.62	3.22	79.35
<b>Maluku Utara</b>	<b>3.08</b>	<b>3.39</b>	<b>74.64</b>
BNN Kabupaten Halmahera Utara	2.25	3.39	95.00
BNN Kabupaten Pulau Morotai	3.09	3.25	76.67
BNN Kota Tidore Kepulauan	3.32	3.45	100.00
BNNP Maluku Utara	3.66	3.41	69.57
<b>Papua</b>	<b>3.29</b>	<b>3.68</b>	<b>97.47</b>
BNN Kabupaten Jayapura	3.59	3.85	95.24
BNN Kabupaten Mimika	3.01	3.42	93.75
BNNP Papua	3.28	3.65	99.46

LAMPIRAN

SURAT Plt. Deputi Rehabilitasi

NOMOR : B/47/I/DE/RH.02/2025/BNN

TANGGAL : 07 Januari 2025

<b>Papua Barat</b>	3.66	3.64	<b>100.00</b>
<b>Balai Besar Rehabilitasi BNN Lido</b>	4	3.64	<b>76.99</b>
<b>Balai Rehabilitasi BNN Baddoka</b>	4	3.63	<b>83.11</b>
<b>Balai Rehabilitasi BNN Tanah Merah</b>	4	3.65	<b>67.97</b>
<b>Loka Rehabilitasi BNN Batam</b>	4	3.76	<b>85.76</b>
<b>Loka Rehabilitasi BNN Deli Serdang</b>	3.81	3.64	<b>89.25</b>
<b>Loka Rehabilitasi BNN Kalianda</b>	4	3.69	<b>63.69</b>



Ditandatangani Secara Elektronik Oleh:  
Plt. Deputi Rehabilitasi



Dr. dr. Farid Amansyah, Sp.PD.



INDIKATOR PELAKSANAAN ANGGARAN

Sampai Dengan : DESEMBER

No	Kode KPPN	Kode BA	Kode Satker	Uraian Satker	Keterangan	Kualitas Perencanaan Anggaran		Kualitas Pelaksanaan Anggaran				Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran	Nilai Total	Konversi Bobot	Dispensasi SPM (Pengurang)	Nilai Akhir (Nilai Total/Konversi Bobot)
						Revisi DIPA	Deviasi Halaman III DIPA	Penyerapan Anggaran	Belanja Kontraktual	Penyelesaian Tagihan	Pengelolaan UP dan TUP	Capaian Output				
1	034	066	682850	BADAN NARKOTIKA NASIONAL KABUPATEN NGANJUK	Nilai	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	100.00	100.00	80.00	80%	0.00	100.00
					Bobot	10	15	20	0	0	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	15.00	20.00	0.00	0.00	10.00	25.00				
					Nilai Aspek	100.00		100.00				100.00				